

2018



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NUSA TENGGARA TIMUR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Nusa Tenggara Timur, telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Nusa Tenggara Timur, atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang selanjutnya diatur dalam Permendikbud 6 Tahun 2017 perubahan dari Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPMP.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Nusa Tenggara Timur tahun 2018 yang terdiri atas 2 sasaran strategis terkait *A). meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan* dengan indikator kinerja *1). Satuan Pendidikan yang Terpetakan mutu pendidikannya* dengan 8 target kinerja a). SD yang telah dipetakan mutunya; b). Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya; c). SMP yang telah dipetakan mutunya; d). Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya e). SMA yang telah dipetakan mutunya; f). Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya; g). SMK yang telah dipetakan mutunya; h). Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya. *2). Satuan Pendidikan Yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP* dengan 4 target kinerja, a). SD yang difasiltasi berdasarkan 8 SNP; b). SMP yang difasiltasi berdasarkan 8 SNP; c). SMA yang difasiltasi berdasarkan 8 SNP; d). SD yang difasiltasi berdasarkan 8 SNP; *3). Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013* dengan 4 target kinerja, a). SD yang melaksanakan Kurikulum 2013; b). SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013; c). SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013; a). SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013. *B). Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang Baik* dengan 2 indikator kinerja *1). Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru*; *2). Nilai minimal SAKIP LPMP NTT*.

Kedua sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran dari 3 tujuan strategis LPMP Nusa Tenggara Timur dan telah melaksanakan berbagai programnya guna merealisasikan target penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja LPMP Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, serta Rencana Strategis LPMP Nusa Tenggara Timur tahun 2015- 2019. Untuk masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan 3 indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*), sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel.

Target hasil secara umum dari program LPMP Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 berhasil dicapai dengan baik, bahkan untuk beberapa indikator target sasaran strategis dapat tercapai secara signifikan. Upaya pelaksanaan program layanan peningkatan penjaminan mutu pendidikan di provinsi, yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat propinsi mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Di pihak lain, LPMP Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa tantangan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras. Diharapkan, dukungan semua pihak dalam

menjawab tantangan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, yang pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.



Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, disampaikan terima kasih.

Kupang, 21 Januari 2018

Kepala,

**Drs. H. Muh. Irfan, MM**

NIP.19660620 199203 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tugas dan Fungsi .....	3
D. Struktur Organisasi .....	4
E. Mekanisme Kerja .....	6
F. Permasalahan .....	7
BAB II Perencanaan dan perjanjian kerja LPMP .....	8
BAB III Akuntabilitas Kinerja LPMP NTT .....	11
A. Capaian Kinerja LPMP NTT .....	11
a.1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Jenjang Pendidikan.....	11
a.2. Tersediannya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya melalui tata Kelola yang baik .....	40
B. Realisasi Anggaran .....	42
BAB IV Penutup .....	48
LAMPIRAN .....	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Nusa Tenggara Timur sebagai Unit Eselon III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi, LPMP Nusa Tenggara Timur melaporkan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam tujuan dan sasaran strategis dari rencana strategis LPMP Nusa Tenggara Timur.

LPMP Nusa Tenggara Timur sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi sesuai Permendikbud 6 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Permendikbud 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPMP, sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil peta mutu pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu 8 standar pendidikan dan satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di tingkat propinsi yang menjadi tanggungjawabnya, dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Nusa Tenggara Timur.

Pagu awal LPMP Nusa Tenggara Timur dalam DIPA tahun 2018 sebesar Rp. 69.604.310.000,- (enam puluh sembilan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dilakukan revisi tingkat DJA untuk pemindahan Belanja Gaji dari LPMP NTT ke LPMP Kalimantan Utara sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga pagu anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 68.604.310.000,- (enam puluh delapan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),- Dari total anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 56.352.602.882,- (lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh dua sen rupiah) dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 11.807.917.118,- (sebelas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas sen rupiah). Pagu anggaran tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dan 18 (delapan belas) target kinerja. Dalam pemanfaatan anggaran LPMP NTT mengalami 3 kali revisi anggaran, 1).Revisi 01 tanggal 2 mei 2018 tingkat DJA revisi pemindahan Belanja Gaji dari LPMP NTT ke LPMP Kalimantan Utara sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu miliar Tiga Ratus Juta Rupiah); 2). Revisi 02 tanggal 26 juli 2018 tingkat DJA untuk buka blokir belanja modal sebesar Rp. 6.999.080.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah); 3). Revisi 03 tanggal 18 Desember 2018 tingkat POK tetapi tetap harus melalui Kanwil untuk revisi belanja Pegawai (uang makan).

Capaian kinerja hasil (*Outcome*) dan *Output* (keluaran) dari yang 2 (dua) sasaran strategis LPMP secara garis besar dapat digambarkan terkait A). *meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan* dengan indikator kinerja 1). *Satuan Pendidikan yang Terpetakan mutu pendidikannya* dengan 8 target kinerja a). SD yang telah dipetakan mutunya sebanyak 5.088 sekolah, PMP dilaksanakan dengan baik oleh semua SD; b). Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya, dari 5088 sekolah gambaran umum SNP menuju pada level 4 sebanyak 2611 lebih besar dibandingkan tahun sebelum yaitu 2609 sekolah dengan skor tertinggi pada standar penilaian pendidikan dan terendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan;

c). SMP yang telah dipetakan mutunya sebanyak 1.633 sekolah, PMP dilaksanakan dengan baik oleh semua; d). Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya dari 1.633 sekolah gambaran umum SNP menuju pada level 4 sebanyak 813 lebih kecil dibandingkan tahun sebelum yaitu 815 sekolah dengan skor tertinggi pada standar proses dan terendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.; e). SMA yang telah dipetakan mutunya; sebanyak 307 sekolah, PMP dilaksanakan dengan baik oleh semua SMA f). Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya, dari 307 sekolah gambaran umum SNP menuju pada level 1 sebanyak 120 sekolah sama besar dengan tahun sebelumnya sekolah dengan skor tertinggi pada standar penilaian pendidikan dan terendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.; g). SMK yang telah dipetakan mutunya sebanyak 280 sekolah, PMP dilaksanakan dengan baik oleh semua SMK; h). Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya, dari 5088 sekolah gambaran umum SNP menuju pada level 4 sebanyak 2611 lebih besar dibandingkan tahun sebelum yaitu 2609 sekolah dengan skor tertinggi pada standar penilaian pendidikan dan terendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

2). *Satuan Pendidikan Yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP* dengan 4 target kinerja, a). SD yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP, Secara umum capaian mutu SNP jenjang SD untuk sekolah model di 22 kabupaten/kota untuk 74 SD seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, atau dapat disimpulkan SD sasaran sekolah model hampir menuju SNP; b). SMP yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP, Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP untuk sekolah model di 22 kabupaten/kota untuk 51 SMP seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, atau dapat disimpulkan SMP sasaran sekolah model hampir menuju SNP; c). SMA yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP, Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA untuk sekolah model di 21 kabupaten/kota 25 SMA seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, atau dapat disimpulkan SMA sasaran sekolah model hampir menuju SNP; d). SMK yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP, Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMK untuk sekolah model di 18 kabupaten/kota untuk 18 SMK seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, atau dapat disimpulkan SMK sasaran sekolah model hampir menuju SNP.

3). *Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013* dengan 4 target kinerja, a). SD yang melaksanakan Kurikulum 2013; b). SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013; c). SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013; a). SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013. Pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan dengan 2 pembiayaan melalui anggaran dalam DIPA LPMP dan anggaran pada DIPA P4TK Penjas khusus untuk guru sasaran. Sasaran untuk jenjang SD, SMP, SMK dan SMK tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan untuk sekolah yang belum pernah dilakukan pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 1.924 SD, 679 SMP, 220 SMA dan 110 SMK.

B). Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang Baik dengan 2 indikator kinerja, terbagi atas 6 output kegiatan untuk mendukung kegiatan inti LPMP. 1). *Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru*; 2). *Nilai minimal SAKIP LPMP NTT*, Nilai SAKIP LPMP NTT tahun 2017 sebesar 65,86 dengan kategori B sedangkan tahun 2018 belum dilakukan evaluasi penilaian oleh Biro Keuangan dan untuk nilai SAKIP yang ditarget dalam Perjanjian Kinerja mencapai skor 70 atau dengan kategori B, penempatan nilai skor pada PK juga mempertimbangkan bahwa indikator kinerja sampai kepada target kinerja yang diperjanjikan membutuhkan kerjasama dengan steacholder di daerah, kesiapan SDM dan keterkaitan/ketergantungan pada kegiatan yang harus berjalan di pusat baru dapat dieksekusi di LPMP dan kemudian diteruskan pada kabupaten/kota bahkan sampai pada tingkat satuan pendidikan



Setiap akhir tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPMP Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Instruksi PERPRES RI No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Permenpan No 53/2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah Peraturan.

**LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:**

- a. **Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.**
- b. **Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.**
- c. **Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya LPMP NTT.**
- d. **LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.**

Selanjutnya, selama kurun waktu satu tahun ini pelaksanaan program dan kegiatan, LPMP Nusa Tenggara Timur menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal sebagai akibat dari kondisi geografis NTT yang merupakan daerah kepulauan sehingga informasi kegiatan yang akan dijalankan di daerah maupun di Kota Propinsi tidak maksimal;
2. Renstra Dirjen Dikdasmen tahun 2015-2019 baru terbit pada bulan November menimbulkan masalah terhadap penyusunan SAKIP dan otomatis menimbulkan kesulitan dalam penyusunan laporan LAKIP secara komprehensif.

Capaian kinerja LPMP Nusa Tenggara Timur, sampai dengan akhir tahun 2018, yang meliputi 3 tujuan strategis terkait program layanan penjaminan mutu pendidikan di provinsi, yaitu:

1. Terpetakannya mutu pendidikan, dan dilakukan supervisi peta mutu pendidikan dasar, menengah dan kesetaraan sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan
2. Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah dan kesetaraan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan
3. Terlaksananya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan peningkatan mutu pendidikan di dasar, menengah di propinsi Nusa Tenggara Timur



Kiranya ketercapaian kinerja LPMP Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018, dapat memberikan kontribusi untuk menopang tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah .

Kupang, 21 Januari 2018



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut sekaligus menjadi tujuan pendidikan yang dikembangkan di Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 31 memperjelas bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sistem pendidikan yang dianut di Indonesia mengandung asas demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dengan tetap mengedepankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pendidikan, meliputi ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu, terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu pendidikan LPMP NTT harus melaporkan seluruh aktivitasnya agar terjadi transparansi dalam penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 ayat 1, maka LPMP Provinsi NTT sebagai lembaga pemerintah di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagaimekanisme untuk

mengukur keberhasilan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, laporan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini diterbitkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan LAKIP menjadi salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu laporan kinerja instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini memberikan landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan sertamengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan .Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, disusun bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang :

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Provinsi NTT tahun 2018 ;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permendikbud Nomor14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
5. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 , tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT Nomor : 023.03.2.419546/2018 tanggal 7 Desember 2017.

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No.14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP dinyatakan: memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

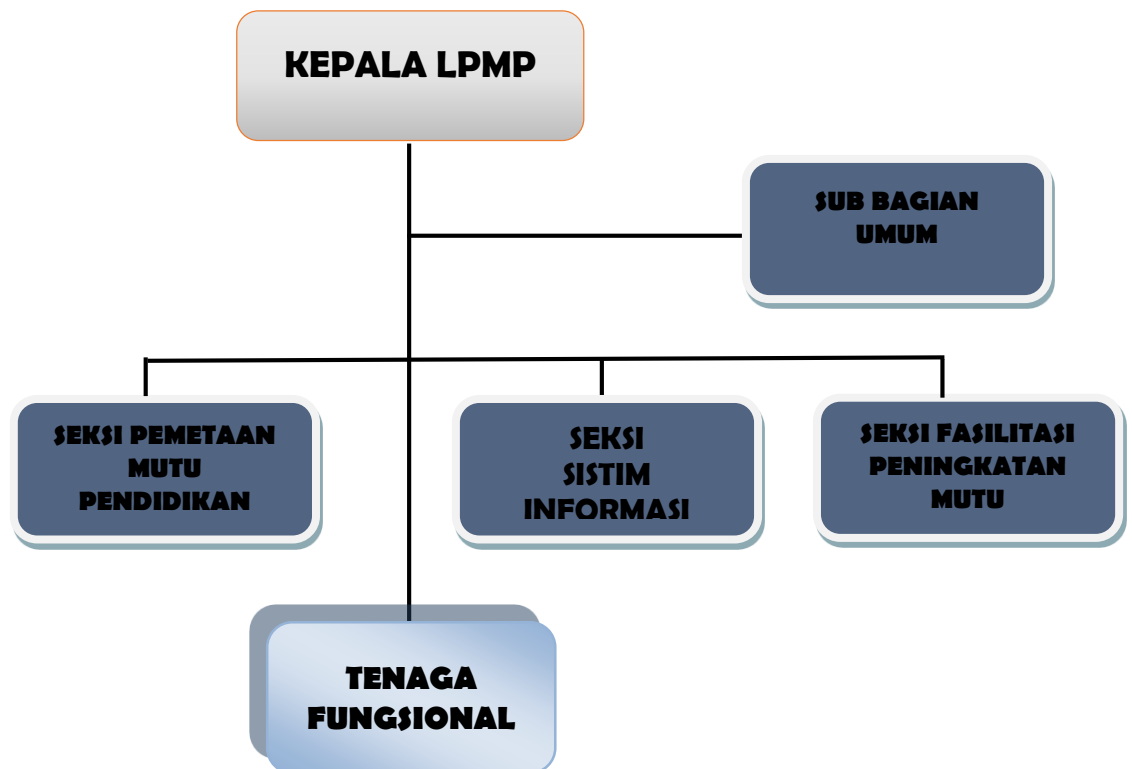
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan dasar dan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan dasar dan menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP;

### **D. STRUKTUR ORGANISASI LPMP PROVINSI NTT**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, maka Organisasi LPMP Provinsi NTT Terdiri dari:

1. Kepala
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi
4. Kepala Seksi Sistem Informasi
5. Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan 1.1.**  
**Struktur Organisasi LPMP NTT**  
**(Permendikbud No. )**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP dibantu oleh Bagian Umum, dan Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, dan kerumahtanggaan terdiri atas :
  1. Bagian Rumah Tangga.  
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, meliputi kantor, asrama, ruang kelas aula dan lingkungan kantor.
  2. Bagian Kepegawaian.  
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian; kehadiran, kenaikan pangkat, Pensiun, membuat Surat melaksanakan Tugas dan urusan kepegawaian lainnya.
  3. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi pelaksanaan anggaran serta laporan LPMP;
  4. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengatur seluruh aset kantor milik negara.

5. Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan Perbendaharaan kantor.
6. Bagian Perpustakaan mempunyai tugas mengatur, melaksanakan kegiatan di perpustakaan.

b). Seksi Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas:

1. Melakukan pemetaan dan pengembangan model, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kemitraan serta evaluasi pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
2. Melakukan supervisi, pengembangan model, dan kemitraan pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.

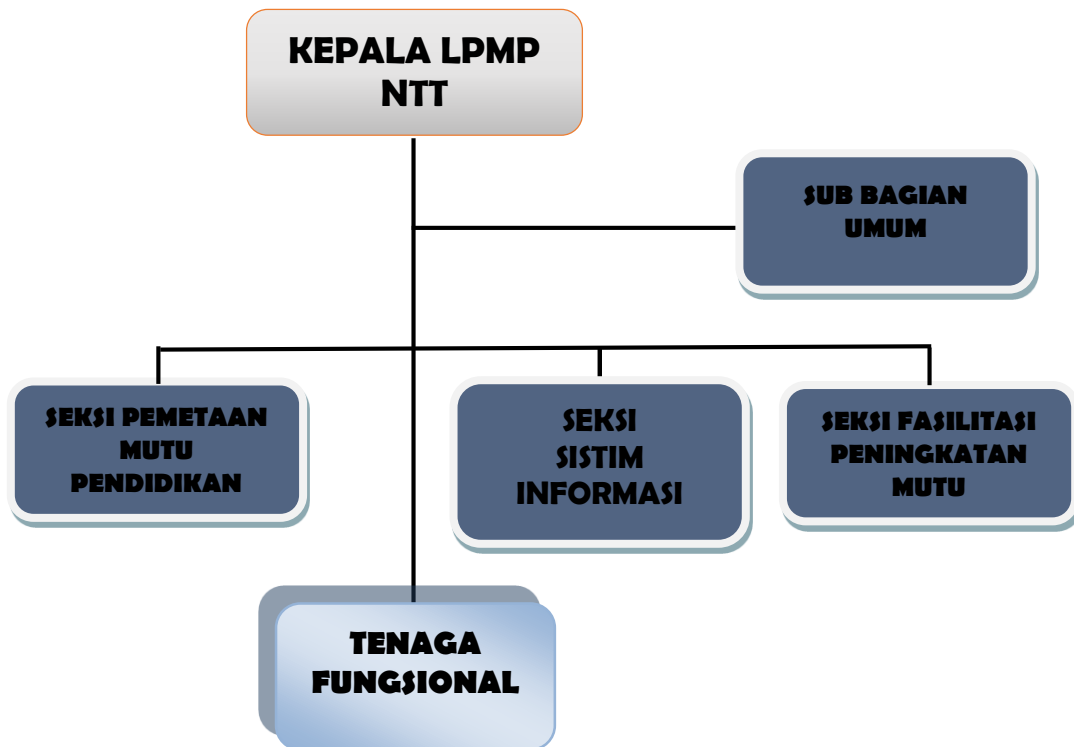
c) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan model penjaminan mutu, dan kemitraan dibidang penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.

LPMP berkewajiban menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala LPMP juga menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta supervisi dan fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

## E. MEKANISME KERJA LPMP NTT

### 1). Mekanisme Kerja Intern

### Bagan 1.2 Mekanisme Kerja Internal LPMP



## 2) Mekanisme Kerja Eksternal

### Bagan 1.3 Mekanisme Kerja Eksternal LPMP





## **F. PERMASALAHAN**

Sebagai upaya pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur , maka permasalahan-permasalahan pendidikan harus dapat diselesaikan dengan baik. LPMP Nusa Tenggara Timur telah mengidentifikasi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama satu tahun ke depan sebagai berikut.

1. Permasalahan akreditasi sekolah, masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi sehingga akselerasi sekolah tersebut perlu ditingkatkan agar mutu pendidikan menjadi lebih baik dan peningkatan dari akreditasi B menjadi A pada sekolah.
2. Terkait sarana dan prasarana terutama jumlah ruang rusak sedang dan rusak berat agar pelaksanaan KBM menjadi lebih nyaman dan baik.
3. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui Pemetaan Mutu Pendidikan.
4. Pemerataan dan kekurangan jumlah guru PNS di Nusa Tenggara Timur di semua tingkatan jenjang dari SD sampai SMK.
5. Ketuntasan serta keseragaman penerapan kurikulum K13 pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di Nusa Tenggara Timur .

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA LPMP NTT**

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTT pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan berpedoman pada perjanjian kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Berdasarkan sasaran strategis tersebut melahirkan 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya
2. Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP
3. Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja tersebut dirumuskan untuk menghasilkan 12 (delapan) output yaitu:

1. Data Peta Mutu SD Propinsi NTT
2. Data Peta Mutu SMP Propinsi NTT
3. Data Peta Mutu SMA Propinsi NTT
4. Peta Mutu SMK Propinsi NTT
5. Laporan hasil fasilitasi SD Propinsi NTT
6. Laporan hasil fasilitasi SMP Propinsi NTT
7. Laporan hasil fasilitasi SMA Propinsi NTT
8. Laporan hasil fasilitasi SMK Propinsi NTT
9. Laporan Pelaksanaan Kurikulum 2013 jenjang SD
10. Laporan Pelaksanaan Kurikulum 2013 jenjang SMP
11. Laporan Pelaksanaan Kurikulum 2013 jenjang SMA
12. Laporan Pelaksanaan Kurikulum 2013 jenjang SMK

Pada tabel di bawah ini secara ditampilkan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi NTT tahun 2018

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Provinsi NTT dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

**PROGRAM : Pendidikan Dasar dan Menengah**

**KEGIATAN : Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	ANGGARAN
1	2		3	4
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	<b>Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</b>		7.517 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	<b>4.715.481.000,-</b>
	1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	
		<b>Output:</b>		
		<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	5.117	
	3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		<b>Output:</b>		
		<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	1.611	
	5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		<b>Output:</b>		
		<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	512	
	7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	
		<b>Output:</b>		
		<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	277	
	<b>Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</b>		168 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	<b>4.514.231.000,-</b>
	<b>Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013</b>		2. 989 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	<b>20.781.665.000,-</b>
	9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		<b>Output:</b>		
		<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	74	
		<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	2.021	9.076.675.000,-
	10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		<b>Output:</b>		
		<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	51	
		<i>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	651	4.558.485.000,-
	11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		<b>Output:</b>		
		<i>a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	25	
		<i>b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	205	3.377.230.000,-
	12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		<b>Output:</b>		
		<i>a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	18	
		<i>b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	112	3.769.275.000,-

2. Terwujudnya Tata kelola LPMP NTT yang baik	1	<b>Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan</b>	<b>92%</b>	<b>3.178.583.000,-</b>
	2	<b>Nilai Minimal \$AKIP LPMP NTT</b>	<b>70</b>	

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dimasukkan dalam perjanjian Kinerja adalah **Rp. 33.189.960.000,-** (Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jumlah anggaran keseluruhan dalam DIPA LPMP Provinsi NTT adalah **Rp. 68.160.520.000,-** (Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Adapun sisa anggaran yang tidak dimasukkan dalam perjanjian kinerja terkait dengan pembiayaan belanja pegawai dan belanja modal serta sebagian belanja barang untuk dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan, dan keperluan sehari-hari perkantoran lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja secara Fisik terserap 93,89% dengan anggaran sebesar Rp. 33.051.359.346,- dan sisa anggaran Rp. 138.600.654,- dan secara fisik terukur melalui pelaksanaan kegiatan pada DIPA LPMP NTT.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA LPMP NUSA TENGGARA TIMUR**

### **A. CAPAIAN KINERJA LPMP NUSA TENGGARA TIMUR**

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2018, LPMP Nusa Tenggara Timur menetapkan dua sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja kegiatan :

1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.
2. Tersediannya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui peningkatan tatakelola

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja kegiatannya selama tahun 2018.

#### ***Sasaran Strategis #1***

#### **Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan**

Ketercapaian sasaran strategis “meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan” tersebut dilihat melalui ketercapaian 3 (Tiga) indikator kinerja yang terpetakan pada 16 (Enam Belas) output sebagai berikut:

- A. Persentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya :
  1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya;
  2. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya;
  3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya;
  4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya;
  5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya;
  6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya;
  7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya;
  8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya;
- B. Persentase satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP :
  1. Persentase SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP;
  2. Persentase SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP;
  3. Persentase SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP;
  4. Persentase SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP;
- C. Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013 :
  1. Jumlah SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013;
  2. Jumlah SMP yang Melaksanakan Kurikulum 2013;
  3. Jumlah SMA yang Melaksanakan Kurikulum 2013;
  4. Jumlah SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013;

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.



Tabel 3.1 Capaian Kegiatan LPMP NTT Tahun 2016 sampai dengan 2018 terhadap PK dan Renstra LPMP Tahun 2015-2019.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN OUTPUT BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019	SASARAN OUTPUT 2016			SASARAN OUTPUT 2017			SASARAN OUTPUT 2018			PERSANDINGAN PENINGKATAN REALISASI (TAHUN 2016 : 2017 : 2018)		% TARGET OUTPUT TERHADAP TARGET RENSTRA 2015- 2019		
			ALOKA SI	REALISASI	%	ALOKA SI	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%	2016 : 2017	2017 : 2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	<b>Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</b>	<b>7545</b>	<b>2952</b>	<b>4685</b>	<b>152,69%</b>	<b>4685</b>	<b>5049</b>	<b>107,77%</b>	<b>7.516</b>	<b>7516</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,88%</b>	<b>54,79%</b>	<b>34,65%</b>	<b>43,96%</b>	<b>99,89%</b>
	1 SD yang telah dipetakan mutunya	5.117	2.234	3.235	144,81%	3.235	3.443	106,43%	5.088	5.088	100,00%	4,06%	32,15%	43,66%	63,22%	99,43%
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,43%	99,43%	100,00%	0,00%	99,43%	0,00%	0,00%	99,43%
	<b>Output</b>															
	<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	5.117	2.234	3.235	144,81%	3.235	3.443	106,43%	5.088	5.088	100,00%	4,06%	32,15%	43,66%	63,22%	99,43%
	3 SMP yang telah dipetakan mutunya	1.633	404	985	243,81%	985	1.125	114,21%	1.633	1.633	100,00%	8,57%	31,11%	24,74%	60,32%	100,00%
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>Output</b>															
	<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	1.633	404	985	243,81%	985	1.125	114,21%	1.633	1.633	100,00%	8,57%	31,11%	24,74%	60,32%	100,00%
	5 SMA yang telah dipetakan mutunya	515	209	307	146,89%	307	319	103,91%	515	515	100,00%	2,33%	38,06%	40,58%	59,61%	100,00%
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100,00%	0,00%	100,00%	0%	0%	100%
	<b>Output</b>															
	<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	515	209	307	146,89%	307	319	103,91%	515	515	100,00%	2,33%	38,06%	40,58%	59,61%	100,00%
	7 SMK yang telah dipetakan mutunya	280	105	158	150,48%	158	162	102,53%	280	280	100,00%	1,43%	42,14%	37,50%	56,43%	100,00%
	8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100,00%	0,00%	100,00%	0%	0%	100%
	<b>Output</b>															
	<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	280	105	158	150,48%	158	162	102,53%	280	280	100,00%	1,43%	42,14%	37,50%	56,43%	100,00%
	<b>Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>100,00%</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>100,00%</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013</b>	<b>7323</b>	<b>1713</b>	<b>1713</b>	<b>100,00%</b>	<b>2621</b>	<b>2621</b>	<b>100,00%</b>	<b>2989</b>	<b>2989</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,40%</b>	<b>5,03%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	9 SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	5117														
	<b>Output</b>															
	<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		74	74	100,00%	74	74	100,00%	88	88	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		1222	1222	100,00%	1772	1772	100,00%	2021	2021	100,00%	10,75%	4,87%	100,00%	100,00%	100,00%
	10 SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	1633														
	<b>Output</b>															
	<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		51	51	100,00%	51	51	100,00%	88	88	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		371	371	100,00%	575	575	100,00%	651	651	100,00%	12,49%	4,65%	100,00%	100,00%	100,00%
	11 SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	515														
	<b>Output</b>															
	<i>a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		25	25	100,00%	25	25	100,00%	88	88	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		91	91	100,00%	178	178	100,00%	205	205	100,00%	16,89%	5,24%	100,00%	100,00%	100,00%
	12 SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	280														
	<b>Output</b>															
	<i>a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>		18	18	100,00%	18	18	100,00%	88	88	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>		29	29	100,00%	96	96	100,00%	112	112	100,00%	23,93%	5,71%	100,00%	100,00%	100,00%





Tabel. 3.2 Pengukuran Kinerja LPMP Nusa Tenggara Timur Tahun 2018  
Pengukuran Kinerja terhadap pemanfaatan anggaran pada DIPA LPMP NTT pada tingkat output dan outcome pada 2 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Target Anggaran		
		Sat	Vol	Real	(%)	Alokasi	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	<b>SATUAN PENDIDIKAN YANG TERPETAKAN MUTU PENDIDIKANNYA</b>							
	<b>SEKOLAH YANG TERVERIFIKASI DATA MUTUNYA</b>							
	Jumlah peserta Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan	orang	66	66	100,00%	251.482.000	250.515.000	99,62%
	Jumlah Operator yang mengikuti Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data	orang	86	86	100,00%	232.346.000	231.014.105	99,43%
	Jumlah pengawas yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	766	766	100,00%	1.261.485.000	1.261.044.200	99,97%
	Persentase Data PMP	sek	7400	6381	86,23%	452.990.000	452.400.000	99,87%
	Jumlah Sekolah yang diverifikasi dan divalidasi	sek	20	20	100,00%	1.226.653.000	1.225.128.700	99,88%
	<b>Jumlah Sekolah yang dipetakan Mutu Pendidikan</b>							
	Peta Mutu	sek	4685	4685	100,00%	22.400.000	22.350.300	99,78%
	Analisis Data Mutu	keg	1	1	100,00%	289.039.000	287.506.100	99,47%
	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu	KEG	1	1	100,00%	351.670.000	351.486.400	99,95%
	Diseminasi Pemetaan Mutu	KEG	1	1	100,00%	627.416.000	626.386.294	99,84%
	<b>SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DIFASILITASI BERDASARKAN 8 SNP</b>							
	<b>SEKOLAH MODEL YANG DIFASILITASI</b>							
	Bimbingan Teknis SPMI	sek	168	168	100,00%	807.228.000	805.440.800	99,78%
	Pendampingan Sekolah Model	KEG	168	168	100,00%	1.772.162.000	1.769.541.500	99,85%
	Monitoring dan Evaluasi	sek	168	168	100,00%	1.241.791.000	1.238.253.500	99,72%
	<b>sekolah yang Difasilitasi Melalui Kemitraan</b>							
	Monitoring dan Evaluasi	keg	168	168	100,00%	190.150.000	149.148.500	78,44%
	Diseminasi Hasil	Keg	168	168	100,00%	502.900.000	501.620.000	99,75%
	<b>SEKOLAH MODEL YANG TELAH DIKEMBANGKAN MUTU PENDIDIKANNYA</b>							
	<b>SD YANG MELAKUKAN KURIKULUM 2013</b>							
	Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013	Keg	1	1	100,00%	631.709.000	627.160.000	99,28%
	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	Keg	1	1	100,00%	2.156.658.000	2.147.704.000	99,58%
	Asistensi dan Bantuan Pemerintah	Keg	2021	2021	100,00%	2.933.960.000	2.931.822.500	99,93%
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah	Keg	1	1	100,00%	333.040.000	332.572.000	99,86%
	Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh Jenjang Pendidikan	Keg	1	1	100,00%	3.021.308.000	3.005.871.590	99,49%
	<b>SMP YANG MELAKUKAN KURIKULUM 2013</b>							
	Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum 2013	Keg	1	1	100,00%	1.077.170.000	1.076.300.000	99,92%
	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	Keg	1	1	100,00%	1.240.600.000	1.239.114.750	99,88%
	Asistensi dan Bantuan Pemerintah	Keg	651	651	100,00%	1.848.880.000	1.848.460.000	99,98%
	Monitoring dan Evaluasi	Keg	1	1	100,00%	391.835.000	391.692.188	99,96%
	<b>SMA YANG MELAKUKAN KURIKULUM 2013</b>							
	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum 2013	Keg	1	1	100,00%	1.183.060.000	1.180.265.750	99,76%
	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	Keg	1	1	100,00%	837.050.000	837.045.250	100,00%
	Asistensi dan Bantuan Pemerintah	Keg	205	205	100,00%	1.241.720.000	1.241.200.000	99,96%
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah	Keg	1	1	100,00%	115.400.000	115.225.000	99,85%
	<b>SMK YANG MELAKUKAN KURIKULUM 2013</b>							
	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum	Keg	1	1	100,00%	839.120.000	833.400.000	99,32%
	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	Keg	1	1	100,00%	956.310.000	949.928.228	99,33%
	Asistensi dan Bantuan Pemerintah	Keg	112	112	100,00%	1.795.445.000	1.789.600.000	99,67%
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah	Keg	1	1	100,00%	178.400.000	177.624.600	99,57%
	<b>LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran	KEG	1	1	100,00%	690.695.000	685.319.000	99,22%
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	KEG	3	3	100,00%	829.905.000	825.481.281	99,47%
	Pengelolaan Data dan Informasi	KEG	1	1	100,00%	358.180.000	356.836.060	99,62%
	Pengelolaan Ketatausahaan	KEG	1	1	100,00%	272.790.000	263.787.200	96,70%
	Pengelolaan Keuangan	KEG	4	4	100,00%	93.220.000	91.371.450	98,02%
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	KEG	1	1	100,00%	933.793.000	931.743.100	99,78%

**Indikator  
Kinerja #1#****Satuan Pendidikan Yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya**

Untuk menjabar indikator tersebut di dalam DIPA LPMP maka indikator tersebut berada pada Output 5630.001 "Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya" dengan penanggungjawab kegiatan Seksi sistim Informasi.

Persentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya terbagi atas 8 indikator kinerja dengan 4 output kegiatan sebagai berikut :

**Target Kinerja  
#1#****"SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya"**

Indikator Kinerja Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya data yang diperoleh melalui Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan dilakukan perbandingan alokasi dan realiasi terhadap Perjanjian Kinerja dan Renstra LPMP tahun 2015 – 2019.

**a. Sasaran Output PMP "Jenjang SD Tahun 2018" terhadap PK:**

Sasaran ouput PMP tahun 2018 untuk jenjang SD sebesar 5.117 sekolah dengan realisasi sebesar 5.088 sekolah atau 99,43%, mencapai target dalam PK , dikarenakan :

- Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP NTT dengan Dinas Kabupaten/Kota
- Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur di luar LPMP yaitu Pengawas dan Operator Sekolah diseluruh Kabupaten/Kota
- Biaya mandiri dari Satuan Pendidikan.

**b. Sasaran Output PMP Jenjang SD Tahun 2018 terhadap Renstra :**

Realisasi sasaran ouput PMP tahun 2018 untuk jenjang SD sebesar 5.117 sekolah dan sasaran output pada PK yang anggarannya dibiayai oleh DIPA sebesar 5.088 SD yang ada di Propinsi NTT data ini menunjukan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan untuk jenjang SD sudah dilaksanakan dengan baik.

**c. Sasaran Output PMP Jenjang SD Tahun 2018 terhadap Sasaran Output SD Tahun sebelumnya :**

Sasaran ouput PMP tahun 2018 untuk jenjang SD yang mengirim data PMP 5.088 sekolah dan tahun 2017 sebesar 5.068 ini menunjukkan Sekolah Dasar di NTT dalam pengiriman data PMP sudah sangat baik.

**Target Kinerja**

#2#

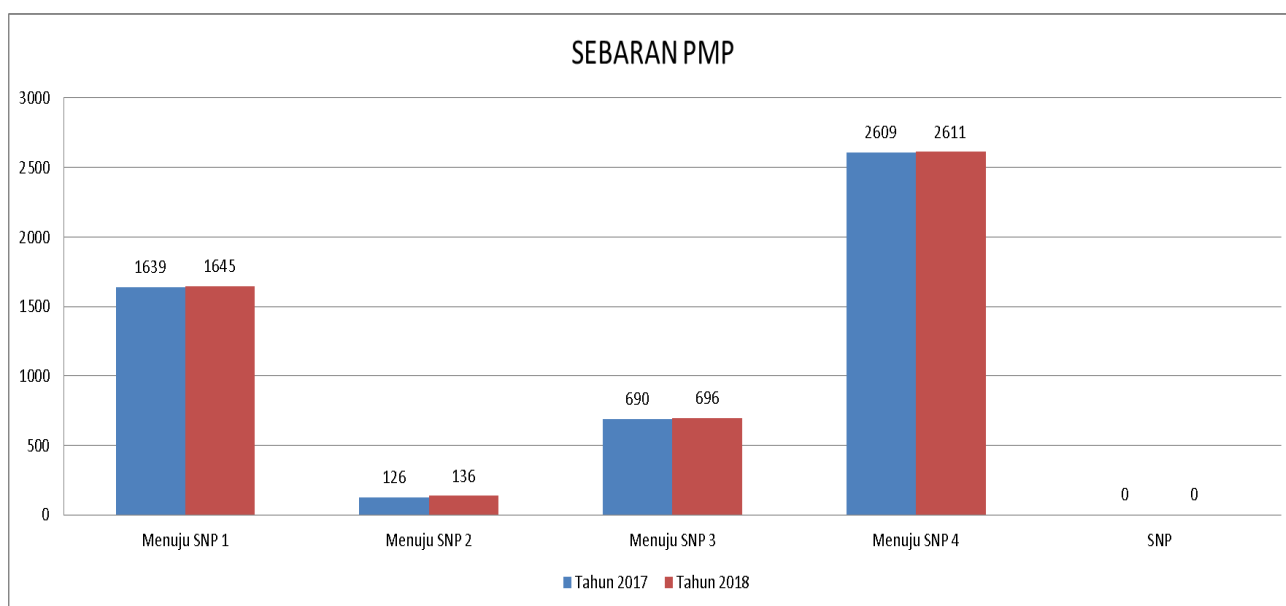
**“Persentase SD yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya”****a. Gambaran Umum Capaian SNP**

Dari 5.117 sekolah dasar yang dipetakan mutunya, sebanyak 5.088 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

- 1). Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
- 2). Menuju SNP level 2 :  $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
- 3). Menuju SNP level 3 :  $3,71 \leq \text{skor} < 5,06$
- 4). Menuju SNP level 4 :  $5,07 \leq \text{skor} < 6,66$
- 5). SNP :  $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,0$

Gambar 3.1. Sebaran PMP Jenjang Sekolah Dasar (SD)  
Propinsi Nusa Tenggara Timur



Tabel 3.3 Skor capaian mutu jenjang SD Nusa Tenggara Timur untuk masing-masing standar

No	Standar Nasional Pendidikan	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	3,96	4,74
2	Standar Isi	4,02	4,74
3	Standar Proses	4,42	5,06
4	Standar Penilaian Pendidikan	5,87	5,87
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,44	3,01
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,51	4,46
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	3,86	4,16
8	Standar Pembiayaan	4,57	4,07

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SD di 22 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, Hal ini menunjukkan ada beberapa SD di NTT yang capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP. Sementara itu, masih cukup banyak SD yang baru menuju level 1. Dengan skor tertinggi pada standar penilaian pendidikan dan terendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

#### **b). Hambatan dan kendala**

Dari 5.117 Sekolah Dasar yang telah terpetakan, ternyata hanya 5.088 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadai; (2). Ketiadaan internet untuk daerah 3T yang sangat tersebar di 22 (3) Kab/Kota jumlah pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; (4) server pusat pemetaan data mutu belum mampu untuk menerima data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyulitkan sekolah dalam pengiriman data.

Di samping kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan kendala tersendiri.

#### **c). Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan**

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.

**Target Kinerja**

#3#

**"SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya"**

Indikator Kinerja Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Propinsi Nusa Tenggara Timur :

**a. Sasaran Output PMP Jenjang SMP Tahun 2018 terhadap PK:**

Sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMP sebesar 1.611 sekolah dengan realisasi sebesar 1.633 sekolah atau 100%, karena :

- Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP NTT dengan Dinas Kabupaten/Kota
- Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur di luar LPMP yaitu Pengawas diseluruh Kabupaten/Kota
- Biaya mandiri dari Satuan Pendidikan.

**b. Sasaran Output PMP Jenjang SMP Tahun 2018 terhadap Renstra :**

Realisasi sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMP sebesar 1.633 sekolah terhadap 1.633 SMP yang ada di Propinsi NTT, data ini menunjukkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan untuk jenjang SMP mencapai 100%.

**c. Sasaran Output PMP Jenjang SMP Tahun 2018 terhadap Sasaran Output SMP Tahun 2017 :**

Sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMP sebesar 1.651 sekolah dan berhasil mengirimkan data PMP 1.633 sekolah sedangkan realisasi sasaran output PMP tahun 2017 yang mengirim data PMP 1.651, ada penurunan sekolah yang mengirim data PMP.

**Target Kinerja**

#4#

**"Persentase SMP yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya"****a. Gambaran Umum Capaian SNP**

Dari 1.651 sekolah Menengah Pertama yang dipetakan mutunya, sebanyak 1.633 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

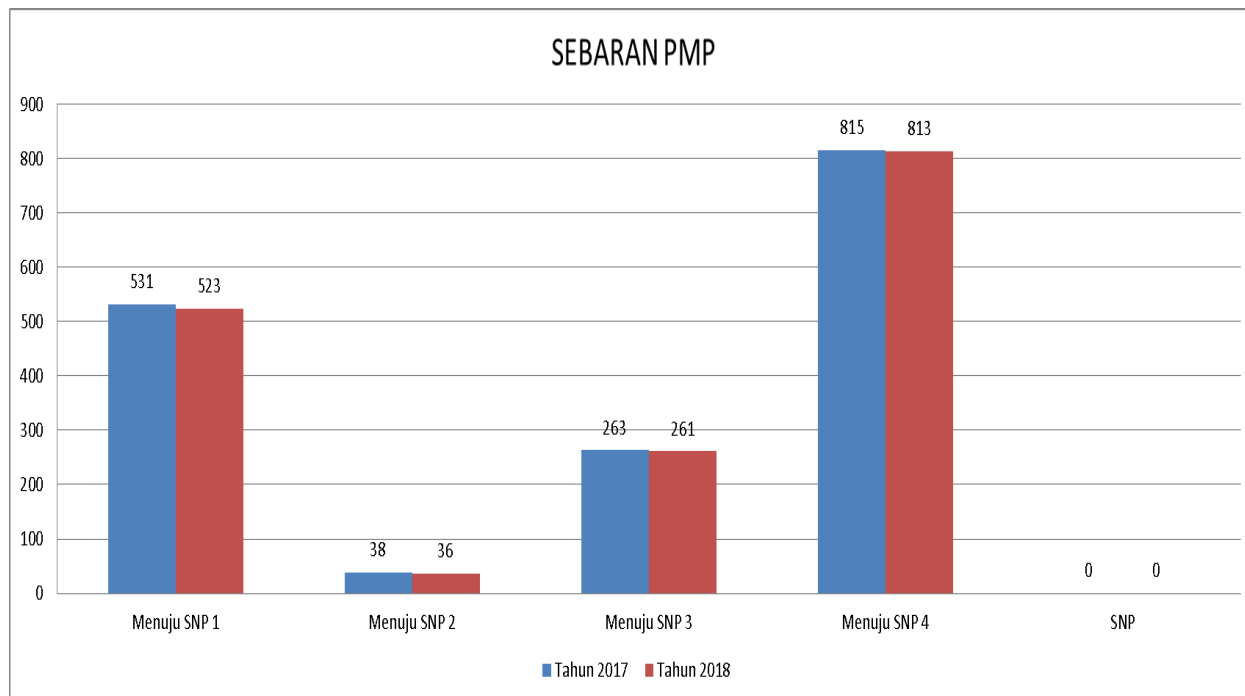
- 1). Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
- 2). Menuju SNP level 2 : 2,04 ≤ skor < 3,70

3). Menuju SNP level 3 :  $3,71 \leq \text{skor} < 5,06$

4). Menuju SNP level 4 :  $5,07 \leq \text{skor} < 6,66$

5). SNP :  $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,0$

**Gambar 3.2. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Propinsi Nusa Tenggara Timur**



**Tabel 3.4 Skor capaian mutu jenjang SMP Nusa Tenggara Timur untuk masing-masing standar**

No	Standar Nasional Pendidikan	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	3,88	4,79
2	Standar Isi	4,1	4,61
3	Standar Proses	4,38	5,00
4	Standar Penilaian Pendidikan	5,75	4,26
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,48	2,89
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,53	4,37
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	3,79	4,02
8	Standar Pembiayaan	4,63	4,1

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP di 22 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, Hal ini menunjukkan ada beberapa



Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP di 22 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4” sebesar 1.633, Hal ini menunjukkan ada beberapa SMP di NTT yang capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP. Sementara SMP yang baru menuju level 1 masih sangat besar. Dengan skor tertinggi pada standar proses dan terendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

#### **b). Hambatan dan kendala**

Dari 1.651 Sekolah Dasar yang telah terpetakan, ternyata hanya 1.633 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadai; (2). Ketiadaan internet untuk daerah 3T yang sangat tersebar di 22 (3) Kab/Kota jumlah pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; (4) server pusat pemetaan data mutu belum mampu untuk menerima data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyulitkan sekolah dalam pengiriman data.

Di samping kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan kendala tersendiri.

#### **c). Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan**

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.

### **Target Kinerja**

**#5#**

#### **SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya**

Indikator Kinerja Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Propinsi Nusa Tenggara Timur :

#### **a. Sasaran Output PMP Jenjang SMA Tahun 2018 terhadap PK:**

Sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMA sebesar 307 sekolah dengan realisasi sebesar 319 sekolah atau 104%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam PK dan dibiayai oleh DIPA dikarenakan :

- Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP NTT dengan Dinas Kabupaten/Kota
- Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur di luar LPMP yaitu Pengawas diseluruh Kabupaten/Kota

- Biaya mandiri dari Satuan Pendidikan.

**b. Sasaran Output PMP Jenjang SMA Tahun 2018 terhadap Renstra :**

Realisasi sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMA sebesar 319 sekolah terhadap 512 SMA yang ada di Propinsi NTT data ini menunjukkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan untuk jenjang SMA NTT baru dapat dipetakan sebesar 62,30% atau mengalami peningkatan sebesar 12,24% dari tahun sebelumnya.

**c. Sasaran Output PMP Jenjang SMA Tahun 2018 terhadap Sasaran Output SMA Tahun 2016 :**

Sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMA sebesar 307 sekolah dan tahun 2016 sebesar 209 sedangkan realisasi sasaran output PMP tahun 2018 sebesar 319 sekolah dan realisasi tahun 2016 sebesar 307 sekolah, dari data tersebut terlihat jelas bahwa dari alokasi sasaran PMP mengalami peningkatan 12 sekolah atau 12,24% dari tahun sebelumnya.

**Target Kinerja**

#6#

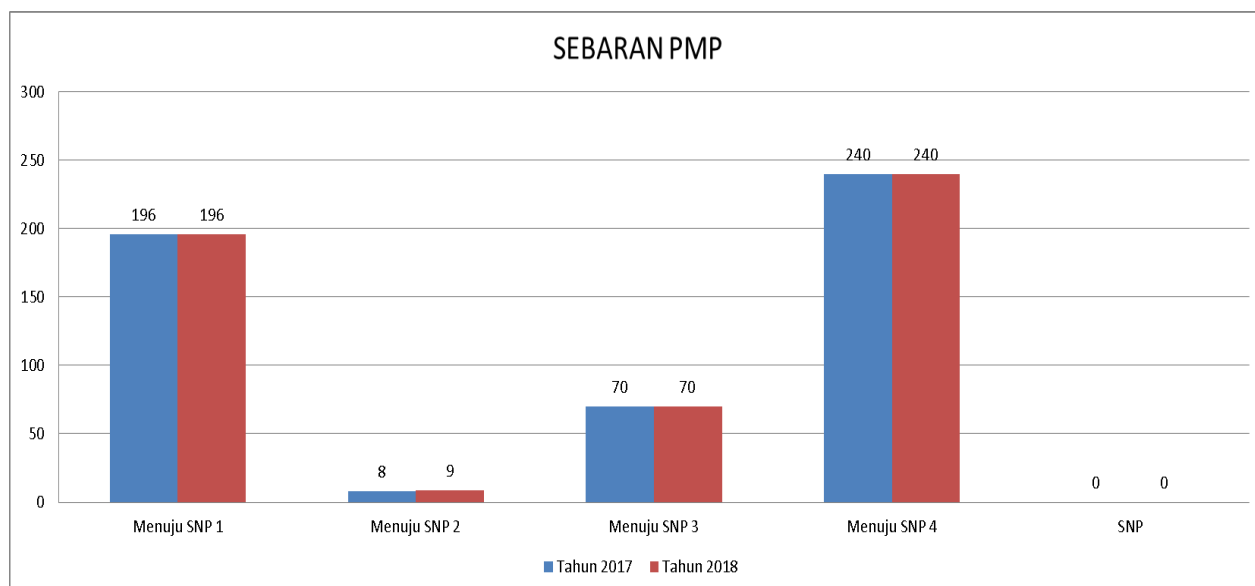
**"Persentase SMA yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya"****a. Gambaran Umum Capaian SNP**

Dari 515 Sekolah Menengah Atas yang dipetakan mutunya, sebanyak 515 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

- 1). Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
- 2). Menuju SNP level 2 :  $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
- 3). Menuju SNP level 3 :  $3,71 \leq \text{skor} < 5,06$
- 4). Menuju SNP level 4 :  $5,07 \leq \text{skor} < 6,66$
- 5). SNP :  $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,0$

**Gambar 3.3. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Propinsi Nusa Tenggara Timur**



**Tabel 3.5 Skor capaian mutu jenjang SMA Nusa Tenggara Timur untuk masing-masing standar**

No	Standar Nasional Pendidikan	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	3,88	4,79
2	Standar Isi	4,1	4,61
3	Standar Proses	4,38	5,00
4	Standar Penilaian Pendidikan	5,75	4,26
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,48	2,89
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,53	4,37
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	3,79	4,02
8	Standar Pembiayaan	4,63	4,1

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA di 22 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4” sebesar 240. Hal ini menunjukkan ada beberapa SMP di NTT yang capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP. Sementara SMA yang baru menuju level 1 masih sangat besar. Dengan skor tertinggi pada standar proses dan terendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

### **b). Hambatan dan kendala**

Dari 515 Sekolah Menengah Atas yang telah terpetakan 515 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Namun permasalahan teknis dalam pengiriman PMP tetap dialami. kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadai; (2). Ketiadaan internet

untuk daerah 3T yang sangat tersebar di 22 Kab/Kota; (3) jumlah pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; (4) server pusat pemetaan data mutu belum mampu untuk menerima data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyulitkan sekolah dalam pengiriman data;

Di samping kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan kendala tersendiri.

### **c). Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan**

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.

### **Target Kinerja**

**#7#**

**“ SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya”**

Indikator Kinerja Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Propinsi Nusa Tenggara Timur :

#### **a. Sasaran Output PMP Jenjang SMK Tahun 2018 terhadap PK:**

Sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMK sebesar 280 sekolah dengan persentase pengiriman PMP sesuai target yang ditetapkan dalam PK dan dibiayai oleh DIPA karena :

- Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP NTT dengan Dinas Kabupaten/Kota
- Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur di luar LPMP yaitu Pengawas diseluruh Kabupaten/Kota
- Biaya mandiri dari Satuan Pendidikan.

#### **b. Sasaran Output PMP Jenjang SMK Tahun 2018 terhadap Renstra :**

Realisasi sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMK sebesar 280 sekolah dan pelaporan PMP sesuai harapan Renstra.

#### **c. Sasaran Output PMP Jenjang SMK Tahun 2018 terhadap Sasaran Output SMK Tahun 2017 :**

Sasaran output PMP tahun 2018 untuk jenjang SMA sebesar 280 sekolah dan tahun, dari data tersebut terlihat jelas bahwa dari sasaran PMP untuk jenjang ini semua terkirim baik tahun sebelum maupun tahun berjalan .

## Target Kinerja

#8#

**“Persentase SMK yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya”**

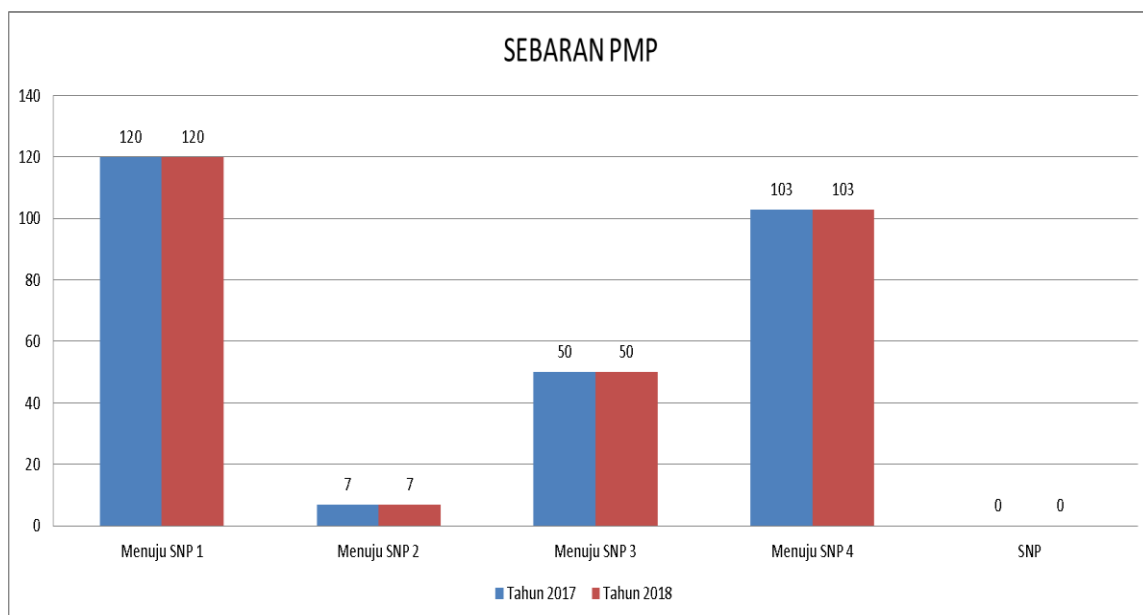
### a. Gambaran Umum Capaian SNP

Dari 280 sekolah Menengah Kejuruan yang dipetakan mutunya, sebanyak 280 atau sama besar dengan target sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

- 1). Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
- 2). Menuju SNP level 2 :  $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
- 3). Menuju SNP level 3 :  $3,71 \leq \text{skor} < 5,06$
- 4). Menuju SNP level 4 :  $5,07 \leq \text{skor} < 6,66$
- 5). SNP :  $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,0$

**Gambar 3.4. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Propinsi Nusa Tenggara Timur**



Tabel 3.6 Skor capaian mutu jenjang SMK Nusa Tenggara Timur untuk masing-masing standar

No	Standar Nasional Pendidikan	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	3,56	4,59
2	Standar Isi	3,59	4,71
3	Standar Proses	3,92	4,89
4	Standar Penilaian Pendidikan	5,89	5,89
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,86	2,75
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2,55	3,68
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	3,45	3,78
8	Standar Pembiayaan	4,13	4,13

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMK di 22 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 1” sebanyak 120 sekolah, capaian mutu SNP-nya sangat jauh dari harapan. Dengan skor tertinggi pada standar penilaian pendidikan dan terendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

#### **b). Hambatan dan kendala**

Dari 280 Sekolah Menengah Kejuruan yang telah terpetakan dan yang dapat diolah peta mutunya. Namun permasalahan teknis dalam pengiriman PMP tetap dialami. kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Pemetaan Data Mutu, yaitu (1) spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi PMP harus tinggi, sedangkan kebanyakan sekolah tidak memiliki komputer yang memadai; (2). Ketiadaan internet untuk daerah 3T yang sangat tersebar di 22Kab/Kota; (3) jumlah pertanyaan yang sangat banyak juga mempengaruhi kinerja aplikasi; (4) server pusat pemetaan data mutu belum mampu untuk menerima data yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyulitkan sekolah dalam pengiriman data.

Di samping kendala teknis, tidak dilatihnya operator sekolah tentang penggunaan aplikasi PMP juga merupakan kendala tersendiri.

#### **c). Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan**

Untuk memecahkan kendala di atas, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah sasaran sesuai dengan target sasaran jumlah sekolah yang akan dipetakan. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.



**Foto Kegiatan Pelatihan Pengawas pada Pemetaan Data Mutu Jenjang SD, SMP dan SMA/K**

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Satuan Pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya pada DIPA LPMP NTT berada pada Output 5630.001 yang terbagi atas 6 komponen kegiatan, yaitu :

**1) Bimbingan Teknis Dapodik Tingkat Propinsi**

Waktu Pelaksanaan	: 19 s.d 22 Maret 2018
Tujuan Kegiatan	: Memperoleh Gambaran tentang Data pendidikan menengah di Propinsi NTT
Hasil Yang diharapkan	: Mengetahui data sekolah Menengah
Kendala	: a. Data secara valid susah didapat karena LPMP tidak mengakses Dapodik b. Pelaksana Kegiatan yang serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan narasumber pusat mengakibatkan keterbatasan narasumber
Solusi	: Menunggu jadwal Narasumber Pusat yang akan membawa materi.

**2) Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan**

Waktu Pelaksanaan	: 19 s.d 22 Maret 2018
Tujuan Kegiatan	: Tersosialisasinya Program PMP NTT kepada dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Hasil Yang diharapkan	: Diperoleh data PMP Propinsi NTT jenjang SD s.d SMA/K
Kendala	: Tidak semua kabupaten mengikuti kegiatan karena transportasi yang sulit
Solusi	: hasil sosialisasi diteruskan ke Kabupaten yang tidak mengikuti kegiatan.



### **3) Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data Mutu Pendidikan Tahun 2018**

Waktu Pelaksanaan	:	16 s.d. 18 Juli 2018
Sasaran	:	Operator dapodik 22 Kab/Kota
Hasil yang Diharapkan	:	Mampu memahami dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengumpulan data mutu satuan pendidikan (persiapan, pelatihan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi; Mampu memahami dan menjelaskan isi instrumen pengumpulan data mutu satuan pendidikan; Mampu berperan sebagai fasilitator dalam penyiapan pengawas sekolah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengumpulan data mutu pendidikan pada satuan pendidikan.
Kendala	:	Peserta yang dikirimkan oleh dinas untuk mengikuti kegiatan tidak terlalu memahami atau menguasai IT; Ada beberapa kabupaten yang belum memiliki pengawas tingkat dikmen.
Rekomendasi/Solusi	:	Agar lebih meningkatkan koordinasi kepada pihak Dinas PPO kab/Kota terkait fasilitasi keikutsertaan peserta kegiatan baik di daerah kab./kota maupun di LPMP, sehingga koordinasi kepada pihak operator dinas PPO Kab./Kota maupun operator sekolah; inas Pendidikan Kab./Kota agar dapat memberikan motivasi kepada pengawas agar dapat mempelajari sistem penjaminan mutu agar progres dan kualitas data mutu lebih dapat ditingkatkan dan sesuai dengan kondisi real sekolah

### **4) Bimbingan Teknis Pengawas**

Waktu Pelaksanaan	:	29 Juli s.d 17 Agustus 2018
Sasaran	:	Pengawas di 22Kab/Kota
Hasil yang Diharapkan	:	Hasil pengisian PMP yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya; Peserta mampu memahami dan menjelaskan isi instrumen pemetaan; Peserta mampu memahami mekanisme pelaksanaan pemetaan (persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi); Mampu berperan sebagai koordinator pengumpulan data pada sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawabnya; Mampu memverifikasi dan memvalidasi data mutu sekolah.
Kendala	:	Peserta bimtek tidak melibatkan seluruh pengawas sekolah dikdas maupun Dikmen; Masih banyak pengawas yang belum menguasai IT; Aplikasi baik Dapodik maupun PMP yang terlalu sering berganti versi; Akses Jaringan internet di daerah yang kurang bagus bahkan

- ada beberapa tempat yang tidak ada sinyal; Tempat tinggal peserta yang jauh dari ibu kota kabupaten tempat dilaksanakan bimtek sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal.
- Rekomendasi/Solusi : Peserta bimtek sebaiknya melibatkan seluruh pengawas sekolah dikdas maupun Dikmen, perlu juga melibatkan operator sekolah perwakilan per kecamatan dan Kepala sekolah perwakilan per jenjang per kecamatan agar informasi sistem penjaminan mutu yang disampaikan bisa lebih tepat sasaran

## **5) Bimbingan Teknis Dapodik Tahap II Tingkat Propinsi**

- Waktu Pelaksanaan : 03 s.d. 06 Des 2018
- Sasaran : 61 Operator dapodik yang tidak mengikuti kegiatan sebelumnya
- Hasil yang Diharapkan : Tersosialisasikannya kebijakan pendataan 2018; Tersosialisasikannya kebijakan dan program pendidikan dasar dan menengah tahun 2019; Tersosialisasikannya kebijakan rencana kegiatan sekolah dan aplikasi RKAS; Adanya pelatihan Aplikasi Dapodikdasmen 2019 dan manajemen Dapodikdasmen; Adanya pelatihan aplikasi penyaluran BOS; Adanya pelatihan aplikasi RKAS dan Manajemen RKAS untuk Dinas Provinsi dan kabupaten Kota
- Kendala : Peserta dari kabupaten yang tidak dapat mengikuti kegiatan karena masalah transportasi susah; Narasumber pusat yang tidak bisa hadir menyebabkan ada materi yang tidak tersampaikan secara maksimal. LPMP NTT agar dapat bekerjasama dengan tim
- Rekomendasi/Solusi : dapodikdasmen pusat untuk memberikan pelatihan kepada operator dinas secara lebih intensif sehingga dapat menyelesaikan setiap masalah dapodik dengan lebih baik; Perlu dibentuknya pagayuban operator di tingkat kecamatan agar pelaksanaan pendataan lebih maksimal

## **6) Monev Penyusunan Rekomendasi Penjaminan Mutu Pendidikan**

- Waktu Pelaksanaan : 17 s.d. 23 des 2018
- Sasaran : Pengawas 22 Kab/Kota
- Hasil yang Diharapkan : Tersedianya data dan informasi berkaitan dengan kondisi pelaksanaan pengumpulan data mutu.

Kendala	: Pengeluhan dari pengawas binaan karena operator tidak bisa mengonlinekan data PMP karena sinyal terutama di daerah perbatasan tidak ada
Rekomendasi/solusi	: Operator yang masih bisa dijangkau di kumpulkan di kecamatan terdekat yang masih memiliki signal.

**Indikator  
Kinerja #2#**

**“Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP”**

Untuk menjabar indikator tersebut di dalam DIPA LPMP maka indikator tersebut berada pada Output 5630.003 “Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP” dengan penanggungjawab kegiatan Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi.

Dari 7.517 sekolah di NTT, sekolah model yang menjadi sasaran dalam pembiayaan melalui DIPA hanya 168 sekolah yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota di NT. Dari kesemuanya 168 sekolah dapat diolah peta mutunya melalui pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018.

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

- 1). Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
- 2). Menuju SNP level 2 :  $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
- 3). Menuju SNP level 3 :  $3,71 \leq \text{skor} < 5,06$
- 4). Menuju SNP level 4 :  $5,07 \leq \text{skor} < 6,66$
- 5). SNP :  $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,0$

# Target Kinerja

#9a#

Tabel 3.7 Skor capaian mutu jenjang SD sekolah model pada 22 Kab/Kota se Nusa Tenggara Timur

No	Provinsi	Kabupaten	Capaian 2018	
			Nilai	Kategori
1	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	4,52	★★★★
2	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	5,81	★★★★★
3	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	5,65	★★★★★
4	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	4	★★★★
5	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	5,06	★★★★★
6	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	5,59	★★★★★
7	Prop. Nusa Tenggara Timur	KAB. MALAKA	2,62	★★
8	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	4,44	★★★★
9	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	4,02	★★★★
10	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	3,27	★★
11	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagakeo	5,73	★★★★★
12	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	5,59	★★★★★
13	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao	4,43	★★★★
14	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	4,37	★★★★
15	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	5,51	★★★★★
16	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	3,45	★★
17	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	5,87	★★★★★
18	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	4,02	★★★★
19	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	4,64	★★★★
20	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	5,45	★★★★★
21	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	5,54	★★★★★
22	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	3,49	★★

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SD untuk sekolah model di 22 kabupaten/kota untuk 74 SD seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, atau dapat disimpulkan SD sasaran sekolah model hampir menuju SNP

### Target Kinerja

#10a#

Tabel 3.8 Skor capaian mutu jenjang SMP sekolah model pada 22 Kab/Kota se Nusa Tenggara Timur

No	Provinsi	Kabupaten	Capaian 2018	
			Nilai	Kategori
1	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	5,49	★★★★★
2	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	5,33	★★★★★
3	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	3,6	★★★
4	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	4,31	★★★★
5	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	3,16	★★★
6	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	5,37	★★★★★
7	Prop. Nusa Tenggara Timur	KAB. MALAKA	4,76	★★★★
8	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	5,29	★★★★★
9	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,44	★
10	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	3,44	★★★
11	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagakeo	3,73	★★★★
12	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	5,46	★★★★★
13	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao	5,71	★★★★★
14	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	5,5	★★★★★
15	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	5,55	★★★★★
16	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	5,57	★★★★★
17	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	3,77	★★★★
18	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	5,51	★★★★★
19	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	4,07	★★★★
20	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	3,32	★★★
21	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	4,36	★★★★
22	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	3,28	★★★

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP untuk sekolah model di 22 kabupaten/kota untuk 51 SMP seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, atau dapat disimpulkan SMP sasaran sekolah model hampir menuju SNP

## Target Kinerja #11a#

Tabel 3.9 Skor capaian mutu jenjang SMA sekolah model pada 21 Kab/Kota se Nusa Tenggara Timur

No	Provinsi	Kabupaten	Capaian 2018	
			Nilai	Kategori
1	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	5,13	=====
2	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	2,84	====
3	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	5,87	=====
4	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	5,91	=====
5	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	1,45	<<
6	Prop. Nusa Tenggara Timur	KAB. MALAKA	5,84	=====
7	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	5,84	=====
8	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	5,59	=====
9	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	4,39	=====
10	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagakeo	5,54	=====
11	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	5,42	=====
12	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao	5,7	=====
13	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	5,47	=====
14	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	5,85	=====
15	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	5,77	=====
16	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	5,57	=====
17	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	1,44	<<
18	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	5,29	=====
19	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	5,6	=====
20	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	3,61	====
21	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	3,87	=====

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA untuk sekolah model di 21 kabupaten/kota 25 SMA seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, atau dapat disimpulkan SMA sasaran sekolah model hampir menuju SNP



## Target Kinerja

#12a#

Tabel 3.10 Skor capaian mutu jenjang SMK sekolah model pada 18 Kab/Kota se Nusa Tenggara Timur

No	Provinsi	Kabupaten	Capaian 2017	
			Nilai	Kategori
1	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	4,81	★★★★
2	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,22	◀
3	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	5,84	★★★★★
4	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	2,55	★★★
5	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	5	★★★★
6	Prop. Nusa Tenggara Timur	KAB. MALAKA	1,18	◀
7	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	5,33	★★★★★
8	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,28	◀
9	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	4,03	★★★★
10	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagakeo	4,2	★★★★
11	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	5,02	★★★★
12	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao	5,46	★★★★★
13	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	5,44	★★★★★
14	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	5,05	★★★★
15	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	5,44	★★★★★
16	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	5,79	★★★★★
17	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	1,28	◀
18	Prop. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	5,58	★★★★★

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMK untuk sekolah model di 18 kabupaten/kota untuk 18 SMK seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, atau dapat disimpulkan SMK sasaran sekolah model hampir menuju SNP

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Satuan Pendidikan yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP pada DIPA LPMP NTT berada pada Output 5630.003 yang terbagi atas 4 komponen kegiatan, yaitu :

### 1) Evaluasi Sekolah Model \$PMI

program pengembangan sekolah model diawali dengan kegiatan evaluasi Sekolah Model \$PMI pada 168 sekolah sasaran :

Waktu Pelaksanaan : 19 s.d 22 Maret 2018  
 Tujuan Kegiatan : Memperoleh gambaran tentang perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah baik kepala sekolah dan guru



	sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi sekolah-sekolah model di 22 Kabupaten/Kota se-NTT atau 168 sasaran sekolah model.
Hasil Yang diharapkan	: LPMP NTT khususnya Seksi PMS dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan sekolah terkait perangkat
Kendala	: Tidak semua sekolah model di kabupaten berada didalam kota kabupaten.
Solusi	: LPMP perlu menyusun buku panduan kerja bagi kepala sekolah dan guru sekolah model sehingga menjadi pedoman dalam melengkapi perangkat yang harus dimiliki oleh sekolah model

## **2) Monitoring dan Evaluasi Rutin.**

Setelah dilakukan evaluasi Sekolah model, para peserta kembali ke sekolah masing-masing untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

Waktu Pelaksanaan	: 23 s.d 27 April 2018
Tujuan Kegiatan	: Memantau dan memastikan penerapan sistem penjaminan mutu internal (khususnya Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah dan Buku panduan Kerja Guru sekolah Model) upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap dan terstandar.
Hasil Yang diharapkan	: Dari hasil monitoring diketahui sekolah-sekolah model telah melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis, RAB, dan Struktur Program dan jadwal yang tertera dalam proposal pengajuan dana tetapi ditemukan juga masih banyak sekolah yang belum menyusun dan mengirimkan laporan ke LPMP NTT.
Kendala	: Tidak semua sekolah model di kabupaten berada didalam kota kabupaten.
Solusi	: Perlu dilakukan kegiatan pendampingan bagi sekolah-sekolah model untuk membimbing sekolah-sekolah model dalam upaya menyempurnakan dokumen sekolah.

## **3) Supervisi Rutin Sekolah Model Tahun 2018**

Waktu Pelaksanaan	: Tahap I 16 s.d. 19 Juli 2018, 6 Kabupaten se Daratan Timor NTT Tahap II 10 s.d 11 Oktober 2018 7 sekolah di Kabupaten Kupang Tahap III 27 s.d 29 November 2018, 17 Sekolah di Kab. TTS dan TTU
Tujuan Kegiatan	: Mendapatkan gambaran SPMI terkait pelaksanaan 8 SNP di sekolah.
Hasil yang diharapkan	: diperoleh gambaran pelaksanaan SPMI yang terkait pelaksanaan 8 SNP di sekolah
Masalah/Kendala	: Semua sekolah model belum sepenuhnya menerapkan SPMI terkait 8 Standar secara maksimal; supervisi tidak dapat dilaksanakan di semua sekolah model di NTT hanya sekolah

yang berada di daratan timor atau sebanyak 46 sekolah dari 168 sekolah sasaran sekolah model akibat keterbatasan anggaran.

Rekomendasi/solusi : untuk keterbatasan anggaran supervisi sekolah model data SNP diambil dari aplikasi PMP.

#### **4) Kegiatan Diseminasi Hasil Pelaksanaan Sekolah Model**

Waktu pelaksanaan : 17 s.d. 20 September 2018

Tujuan Kegiatan : Diperoleh bentuk best practice sekolah model

Hasil yang diharapkan : Sekolah model mampu menunjukkan best practice masing – masing.

Kendala/ masalah : Keterbatasan anggaran menyebabkan hanya 66 sekolah model yang dapat diundang pada kegiatan dimaksud; dari 66 sekolah hanya 24 sekolah yang mampu menampilkan best practicenya.

Rekomendasi : Mendorong sekolah model untuk dapat mengalih potensi masing – masing melalui 8 SNP; untuk keterbatasan anggaran diseminasi sekolah model data SNP diambil dari aplikasi PMP

#### **Indikator Kinerja #3#**

##### **“Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013” :**

Untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Tahun 2018 mengalami perubahan pola kegiatan dari tahun sebelum. Pelaksanaan kegiatan Kurikulum 2013 untuk Guru Sasaran di 22 Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh P4TK Penjas dengan melibatkan LPMP sebagai panitia pelaksana untuk membantu pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan pembiayaan anggaran oleh P4TK Penjas.

LPMP mendapat tugas tambahan untuk membiayai penyegaran Instruktur Kabupaten yang akan melatih Guru Sasaran di 22 Kabupaten/Kota terutama untuk sekolah yang belum pernah dilaksanakan pelatihan Kurikulum 2013.

Berbagai kendala dialami oleh LPMP karena harus melakukan koordinasi dengan P4TK Penjas baik itu dalam bentuk data sekolah sasaran Kurikulum 2013 baru maupun proses pembiayaan; ketidapahaman letak geografis NTT oleh Pelaksana kegiatan juga mengakibatkan ada pembiayaan yang tidak dapat di back up.

Untuk mengatasi masalah diatas LPMP tetap melakukan sinkronisasi data dengan P4TK untuk sekolah sasaran yang belum pernah dilakukan pelatihan Kurikulum 2013.

Untuk mendukung pelaksanaan indikator kinerja “Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013” maka melalui DiPA LPMP dilakukan penganggaran pada output 5630.006 dengan penanggungjawab kegiatan Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu pendidikan melalui 14 Komponen Kegiatan sebagai berikut :

**Target Kinerja****#9b#****SD Yang Melaksanakan Kurikulum 2013**

Pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk jenjang SD dilaksanakan dengan 2 pembiayaan melalui anggaran dalam DIPA LPMP dan anggaran pada DIPA P4TK Penjas khusus untuk guru sasaran. Sasaran untuk jenjang SD tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan untuk sekolah yang belum pernah dilakukan pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 1.924 SD.

Proses pelaksanaan kegiatan K13 diakukan oleh LPMP tetapi juga dilaksanakan secara mandiri melalui dana Bantuan Pemerintah yang ditransfer ke rekening sekolah. dan pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri atas 8 Komponen Kegiatan, sebagai berikut :

**1) Rakor Teknis Pendataan Implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh jenjang pendidikan**

Waktu Pelaksanaan	: 19 s.d 22 Februari 2018
Hasil Yang diharapkan	: Diperoleh data induk cluster pada semua jenjang pendidikan di 22 kabuapten/kota di NTT
Kendala	: a. 65% Sekolah yang telah melaksanakan Kuriukulm 2013 sulit diketahui perkembangannya b. Biaya transportasi yang sangat kecil tidak sebanding dengan jarak sekolah yang jauh dan sulit dijangkau
Solusi	: Dilakukan pemantauan ke dinas Kabupaten/kota melalui Pengawas sekolah untuk mengetahui perkembangan implementasi K13 di daerah

**2) Desiminasi Penyegaran Kurikulum 2013 bagi Instruktur Propinsi (IP) Jenjang SD,\$MP dan \$MA**

Waktu Pelaksanaan	: Tahap I 27 s.d 28 Februari 2018 Tahap 2 6 s.d 8 Maret 2018
Hasil Yang diharapkan	: Diperoleh data IP yang perlu dilakukan penyegaran
Hasil Yang diperoleh	: Penyegaran IP dilakukan pada semua jenjang
Kendala	: Tidak semua IP yang pernah dilibatkan dilakukan penyegaran
Solusi	: Penyegaran IP dilaksanakan sesuai kemampuan DIPA LPMP NTT

**3) Bimbingan teknis Penyegaran Tim Pengembangan Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Jenjang SD,\$MP, \$MA dan \$MK**

Waktu Pelaksanaan	: Tahap I 13 s.d 15 Maret 2018 Tahap II 20 6 s.d 22 Maret 2018 Tahap III 12 s.d 14 April 2018
Hasil Yang diharapkan	: Diperoleh data IK yang perlu dilakukan penyegaran
Hasil Yang diperoleh	: Penyegaran IK dilakukan pada semua jenjang
Kendala	: Tidak semua IK mengikuti kegiatan



Solusi : Penyegaran IK dilaksanakan sesuai kemampuan DIPA LPMP NTT

#### **5) Rapat Persiapan Bantuan Pemerintah Jenjang SD**

Waktu Pelaksanaan : 26 s.d 29 Juli 2018  
Sasaran : 150 Induk Cluster  
Hasil Yang diharapkan : Proposal dari masing-masing Induk Klaster Penerima Bantah; MoU yang ditandatangani oleh Pihak LPMP dan Sekolah Induk Klaster  
Kendala : Sekolah Induk Klaster tidak hadir karena bertepatan dengan pelaksanaan audit inpektorat di sekolah.  
Solusi : Hasil rapat disampaikan kepada sekolah yang tidak dapat hadir.

#### **6) Rapat Persiapan Pengeluaran Dana Bantuan Bantah Jenjang SD Tahap II**

Waktu Pelaksanaan : 8 s.d 11 Agustus 2018  
Sasaran : 102 Induk Cluster  
Hasil Yang diharapkan : Proposal dari masing-masing Induk Klaster Penerima Bantah.  
Kendala : sekolah sasaran K13 yang belum pernah mengikuti pelatihan berada pada jarak yang jauh dan transportasi yang sulit; Informasi ke sekolah disampikan melalui telegram sehingga ada sekolah yang terlambat mendapatkan informasi.  
Solusi : undangan kegiatan disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 minggu sebelum kegiatan sehingga penyampaian informasi lanjutan ke sekolah lebih cepat.

#### **7) Pendampingan Penilaian Kurikulum 2013 bagi Pengawas sekolah jenjang SD**

Waktu Pelaksanaan : 8 s.d 11 Agustus 2018  
Sasaran : 4745 sekolah.  
Hasil yang diharapkan : Pemahaman PTK (Pengawas) terhadap Penilaian Kurikulum 2013  
Masalah/Kendala : Kurangnya PTK (Pengawas) jenjang SD di Kabupaten/Kota  
Rekomendasi/solusi : koordinasi intensif dengan Dinas Kabupetrn/Kota.

#### **8) Pendampingan IN 1 Jenjang SD Tahap 1**

Waktu pelaksanaan : 30 sept s.d 8 Okt 2018  
Tujuan Kegiatan : 1575 Sekolah  
Hasil yang diharapkan : Pemahaman PTK (guru) di masing-masing sekolah Imbas dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2018.  
Kendala/ masalah : Terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan jarak sekolah ke Induk Klaster yang jangan jauh  
Rekomendasi : undangan kegiatan disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 minggu sebelum kegiatan sehingga penyampaian informasi lanjutan ke sekolah lebih cepat.

**Target Kinerja**

#10b#

**SMP Yang Melaksanakan Kurikulum 2013**

Pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dilaksanakan dengan 2 pembiayaan melalui anggaran dalam DIPA LPMP dan anggaran pada DIPA P4TK Penjas khusus untuk guru sasaran. Sasaran untuk jenjang SD tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan untuk sekolah yang belum pernah dilakukan pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 679 SMP.

Proses pelaksanaan kegiatan K13 dilakukan oleh LPMP tetapi juga dilaksanakan secara mandiri melalui dana Bantuan Pemerintah yang ditransfer ke rekening sekolah. dan pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri atas 2 Komponen Kegiatan, sebagai berikut :

**1) Rapat Persiapan Penyaluran Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SMP**

Waktu Pelaksanaan	: 10 s.d. 13 Sept 2018
Sasaran	: 125 Induk Cluster
Hasil Yang diharapkan	: Peserta dapat memahami alur pendampingan guru sasaran K 13 di induk kluster; Peserta dapat memahami alur dan menggunakan dana bantuan pemerintah untuk pendampingan guru sasaran pelaksana K 13 sesuai Juklak; Peserta dapat memahami pelaporan dana bantuan pemerintah untuk pendampingan guru sasaran pelaksana K 13 sesuai juklak.
Kendala	: Kurangnya PTK (Pengawas) jenjang SD di Kabupaten/Kota
Solusi	: koordinasi intensif dengan Dinas Kabupetrn/Kota

**2) Pendampingan In 1 Kurikulum 2013 Jenjang SMP Tahun 2018**

Waktu Pelaksanaan	: 29 Sept s.d 9 Okt 2018
Sasaran	: 3977 Sekolah
Hasil Yang diharapkan	: Adanya brainstorming pada peserta sehingga membantu menyegarkan pemahaman peserta terhadap K 13; Peserta lebih memahami pembuatan dokumen dan perangkat pembelajaran yang berbasis K 13.
Kendala	: Jarak sekolah induk kluster yang sangah jauh dari sekolah imbas menyebabkan tidak semua peserta bisa mengikuti kegiatan; Pelaksanaan kegiatan terlalu singkat.
Solusi	: Penentuan sekolah induk kluster dan sekolah imbas agar ditinjau kembali jarak tempuhnya; Pelaksanakan kegiatan minimal 3 hari agar lebih maksimal.

**Target Kinerja**

#11b#

**SMA Yang Melaksanakan Kurikulum 2013**

Pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk jenjang SMA dilaksanakan dengan 2 pembiayaan melalui anggaran dalam DIPA LPMP dan anggaran pada DIPA P4TK Penjas khusus untuk guru

sasaran. Sasaran untuk jenjang SMA tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan untuk sekolah yang belum pernah dilakukan pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 220 SMA.

Proses pelaksanaan kegiatan K13 dilakukan oleh LPMP tetapi juga dilaksanakan secara mandiri melalui dana Bantuan Pemerintah yang ditransfer ke rekening sekolah. dan pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri atas 4 Komponen Kegiatan, sebagai berikut :

### **1) Rapat Persiapan Bantah Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang dan SMA**

Waktu Pelaksanaan	:	26 s.d 29 Juli 2018
Sasaran	:	150 Induk Cluster
Hasil Yang diharapkan	:	Proposal dari masing-masing Induk Klaster Penerima Bantah; MoU yang ditandatangani oleh Pihak LPMP dan Sekolah Induk Klaster
Kendala	:	Sekolah Induk Klaster tidak hadir karena bertepatan dengan pelaksanaan audit inpektorat di sekolah.
Solusi	:	Hasil rapat disampaikan kepada sekolah yang tidak dapat hadir.

### **2) Pendampingan IN I Jenjang SMA Tahap 1**

Waktu pelaksanaan	:	30 November s.d 1 Desember 2018
Tujuan Kegiatan	:	35 Induk Cluster
Hasil yang diharapkan	:	Pemahaman PTK (guru) di masing-masing sekolah Imbas dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2018.
Kendala/ masalah	:	Terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan jarak sekolah ke Induk Klaster yang jangankan jauh
Rekomendasi	:	undangan kegiatan disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 minggu sebelum kegiatan sehingga penyampaian informasi lanjutan ke sekolah lebih cepat.

### **3) Pendampingan IN I Jenjang SMA Tahap 2**

Waktu pelaksanaan	:	3 s.d 5 Desember 2018
Tujuan Kegiatan	:	45 Induk Cluster
Hasil yang diharapkan	:	Pemahaman PTK (guru) di masing-masing sekolah Imbas dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2018.
Kendala/ masalah	:	Terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan jarak sekolah ke Induk Klaster yang jangankan jauh
Rekomendasi	:	undangan kegiatan disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 minggu sebelum kegiatan sehingga penyampaian informasi lanjutan ke sekolah lebih cepat.

### **4) Pendampingan IN I Jenjang SMA Tahap 3**

Waktu pelaksanaan	:	9 s.d 11 Desember 2018
-------------------	---	------------------------





Tujuan Kegiatan	:	125 Induk Cluster
Hasil yang diharapkan	:	Pemahaman PTK (guru) di masing-masing sekolah Imbas dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2018.
Kendala/ masalah	:	Terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan jarak sekolah ke Induk Klaster yang jangan jauh
Rekomendasi	:	undangan kegiatan disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 minggu sebelum kegiatan sehingga penyampaian informasi lanjutan ke sekolah lebih cepat.

**Target Kinerja**  
**#12b#**

**SMK Yang Melaksanakan Kurikulum 2013**

Pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk jenjang SMK dilaksanakan dengan 2 pembiayaan melalui anggaran dalam DIPA LPMP dan anggaran pada DIPA P4TK Penjas khusus untuk guru sasaran. Sasaran untuk jenjang SMK tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan untuk sekolah yang belum pernah dilakukan pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 110 SMK.

Proses pelaksanaan kegiatan K13 di lakukan oleh LPMP tetapi juga dilaksanakan secara mandiri melalui dana Bantuan Pemerintah yang ditransfer ke rekening sekolah. dan pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri atas 8 Komponen Kegiatan, sebagai berikut :

**1) Kegiatan Rapat Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK**

Waktu Pelaksanaan	:	23 s.d. 26 Agustus 2018
Sasaran	:	46 sekolah
Hasil Yang diharapkan	:	Peserta dapat memahami alur pendampingan guru sasaran K 13 di induk kluster; Peserta dapat memahami alur dan menggunakan dana bantuan pemerintah untuk pendampingan guru sasaran pelaksana K 13 sesuai Juklak; Peserta dapat memahami pelaporan dana bantuan pemerintah untuk pendampingan guru sasaran pelaksana K 13 sesuai juklak.
Kendala	:	Ada Kabupaten tertentu seperti Kab. Kupang yang sekolah imbasnya banyak yang seharusnya dapat dibagi beberapa induk klaster tetapi yang ada hanya 1 induk kalster.
Solusi	:	koordinasi intensif dengan Dinas Kabupetn/Kota.

**2) Pendampingan In 1 Kurikulum 2013 Jenjang SMK Tahun 2018**

Waktu Pelaksanaan	:	5 s.d. 9 September 2018
Sasaran	:	647 Sekolah
Hasil Yang diharapkan	:	Adanya brainstorming pada peserta sehingga membantu menyegarkan pemahaman peserta terhadap K 13; Peserta lebih memahami pembuatan dokumen dan perangkat pembelajaran yang berbasis K 13.



Kendala	:	Jarak sekolah induk kluster yang sangat jauh dari sekolah imbas menyebabkan tidak semua peserta bisa mengikuti kegiatan; Pelaksanaan kegiatan terlalu singkat.
Solusi	:	Penentuan sekolah induk kluster dan sekolah imbas agar ditinjau kembali jarak tempuhnya; Pelaksanaan kegiatan minimal 3 hari agar lebih maksimal.

### **3) Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013**

Waktu pelaksanaan	:	'15 Oktober 2018
Tujuan Kegiatan	:	23 Induk Cluster
Hasil yang diharapkan	:	Semua sekolah induk klaster dapat menerima dana bantah dengan baik dan telah menjalankan kegiatannya sesuai juknis yang ada.
Kendala/ masalah	:	Jarak sekolah induk kluster yang sangat jauh dari sekolah imbas menyebabkan tidak semua peserta bisa mengikuti kegiatan; Pelaksanaan kegiatan terlalu singkat.
Rekomendasi	:	undangan kegiatan disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 minggu sebelum kegiatan sehingga penyampaian informasi lanjutan ke sekolah lebih cepat.

#### **Sasaran Strategis #2#**

**Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui peningkatan tata kelola Yang Baik**

Ketercapaian sasaran strategis “tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui peningkatan tata kelola Yang Baik” tersebut dilihat melalui ketercapaian 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu:

#### **Target Kinerja #1#**

**Data Pendidikan Dasar dan Menengah Akurat, Berkelanjutan dan Terbaru**

Untuk menunjang indikator tersebut diatas melalui pembiayaan dalam DIPA pada output 5630.950 dengan penanggungjawab kegiatan Sub Bagian Umum, terbagi atas 6 output kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran.  
Berupa kegiatan koordinasi penyusunan laporan keuangan; penyusunan RKA-KL; supervisi dan asistensi RKA-KL bahwa pelaksanaan anggaran LPMP mengalami 3 (tiga) kali revisi :
  - a. Revisi 01 tanggal 2 mei 2018 tingkat DJA revisi pemindahan Belanja Gaji dari LPMP NTT ke LPMP Kalimantan Utara sebesar Rp. 1. 300.000.000,- (Satu miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
  - b. Revisi 02 tanggal 26 juli 2018 tingkat DJA untuk buka blokir belanja modal sebesar Rp. 6.999.080.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
  - c. Revisi 03 tanggal 18 Desember 2018 tingkat POK tetapi tetap harus melalui Kanwil untuk revisi belanja Pegawai (uang makan)Kegiatan Konsultasi penyusunan program dan kegiatan Penyusunan RKT LPMP NTT.



2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.  
Berupa kegiatan penyusunan laporan daya serap anggaran; pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada 22 Kabupaten/kota sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi pada 50 sekolah di 22 kabupaten/kota.
3. Pengelolaan Data dan Informasi.  
Berupa kegiatan penguatan lembaga dalam rangka penguatan pendidikan melalui USBN SD dan bantuan pemerintah bagi sekolah program Penguatan Pendidikan Karakter oleh Menteri Pendidikan untuk 2 sekolah di Kabupaten Sikka; publikasi penjaminan mutu pendidikan.
4. Pengelolaan ketatausahaan.  
Berupa kegiatan pengembangan kapasitas SDM LPMP NTT; **Tingkat kehadiran pegawai .....**
5. Pengelolaan Keuangan.  
Berupa kegiatan Bimtek penyusunan Laporan Keuangan dan kegiatan review Itjen untuk pembangunan tahap I asrama A.
6. Pelayanan Umum dan perlengkapan  
Berupa Kegiatan Semarak Hardiknas dan Hari Kartini tingkat Provinsi NTT; Pemberkasan dan pemindaian LJUN SMA dan SMK provinsi NTT

**Target Kinerja**

#2#

**Nilai minimal SAKIP LPMP NTT;**

Nilai SAKIP LPMP NTT tahun 2017 sebesar 65,86 dengan kategori B sedangkan tahun 2018 belum dilakukan evaluasi penilaian oleh Biro Keuangan dan untuk nilai SAKIP yang ditarget dalam Perjanjian Kinerja mencapai skor 70 atau dengan kategori B, penempatan nilai skor pada PK juga mempertimbangkan bahwa indikator kinerja sampai kepada target kinerja yang diperjanjikan membutuhkan kerjasama dengan steacholder di daerah, kesiapan SDM dan keterkaitan/ketergantungan pada kegiatan yang harus berjalan di pusat baru dapat dieksekusi di LPMP dan kemudian diteruskan pada kabupaten/kota bahkan sampai pada tingkat satuan pendidikan.

Daya serap tahun 2017 Keuangan sebesar 95,73% sedangkan tahun 2018 sebesar 82,68% penurunan daya serap ini dikarenakan adanya pembiayaan dalam Belanja Pegawai untuk belanja transito sebesar Rp. 10.129.241.000,- dan anggaran ini tidak bisa direvisi untuk digunakan pada kegiatan belanja barang maupun belanja modal.

Tabel 3.2 ketercapaian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui peningkatan tata kelola

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Persentase
Terwujudnya Tata kelola LPMP NTT yang baik	1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	92%	3.178.583.000	3.154.538.091	99,24%
	2	Nilai Minimal SAKIP LPMP NTT	70			



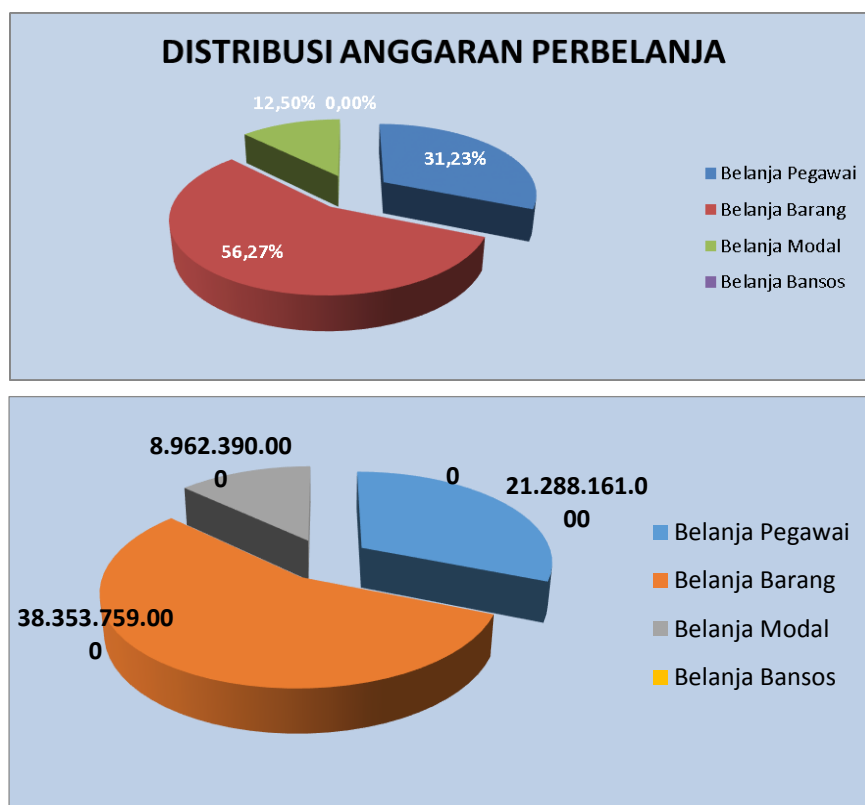
- A. Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh program/kegiatan sebagai berikut:
1. Adanya Tim kerja yang baik terutama dalam penyediaan data kegiatan dan keuangan. Kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan dengan lancar baik di LPMP ataupun yang dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota disebabkan karena adanya kerjasama dalam penyediaan informasi maupun pada saat pelaksanaan kegiatan.
  2. Dukungan anggaran yang baik  
Adanya strategi pencapaian dengan melibatkan unsur di luar LPMP yaitu Pengawas dan Operator Sekolah diseluruh Kabupaten/Kota
  3. Biaya mandiri dari Dinas Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan.
- B. Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut juga ditemui berbagai Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1. Geografis daerah NTT yang mana kabupaten/kota berada 80% di pulau – pulau
  2. SDM yang kurang memadai
  3. Biaya Transportasi yang besar sehingga pengeluaran untuk transportasi melebihi SBU sedang pengeluaran yang lebih tersebut tidak dapat tercover dalam DIPA
- C. Rekomendasi/Solusi

Beberapa langkah antisipasi yang di ambil agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain, Untuk kekurangan SDM maka LPMP melibatkan tenaga outsourcing dari unsur dinas, Kelebihan transportasi di sediakan pengeluaran rill ke satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan DIPA.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pagu awal LPMP Nusa Tenggara Timur dalam DIPA tahun 2018 sebesar Rp. 69.604.310.000,- (enam puluh sembilan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dilakukan revisi tingkat DJA untuk pemindahan Belanja Gaji dari LPMP NTT ke LPMP Kalimantan Utara sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga pagu anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 68.604.310.000,- (enam puluh delapan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),- Dari total anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 56.352.602.882,- (lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh dua sen rupiah) dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 11.807.917.118,- (sebelas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas sen rupiah). Pagu anggaran tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerjanya dan 18 (delapan belas) target kinerja dengan distribusi anggaran sebagai berikut :

Grafik 3.1 Distribusi anggaran perbelanja



Tabel 3.1 Daya serap anggaran perbelanja-belanja pegawai

NO.	URAIAN		BELANJA PEGAWAI		(%)
	KODE	NAMA SATKER	ALOKASI	REALISASI	
I	419546	LPMP PROVINSI NTT	21.288.161.000	9.778.426.722	45,93
			21.288.161.000	9.778.426.722	45,93
	1	Subbag. Umum	21.288.161.000	9.778.426.722	45,93
	2	Kasi. Sistem Informasi	0	0	#DIV/0!
	3	Kasi. Pemetaan dan Supervisi	0	0	#DIV/0!
	4	Kasi. Fasilitas PMP	0	0	#DIV/0!
<b>JUMLAH</b>			<b>21.288.161.000</b>	<b>9.778.426.722</b>	<b>45,93</b>

Tabel 3.2 Daya serap anggaran perbelanja-belanja-Barang-Belanja Modal

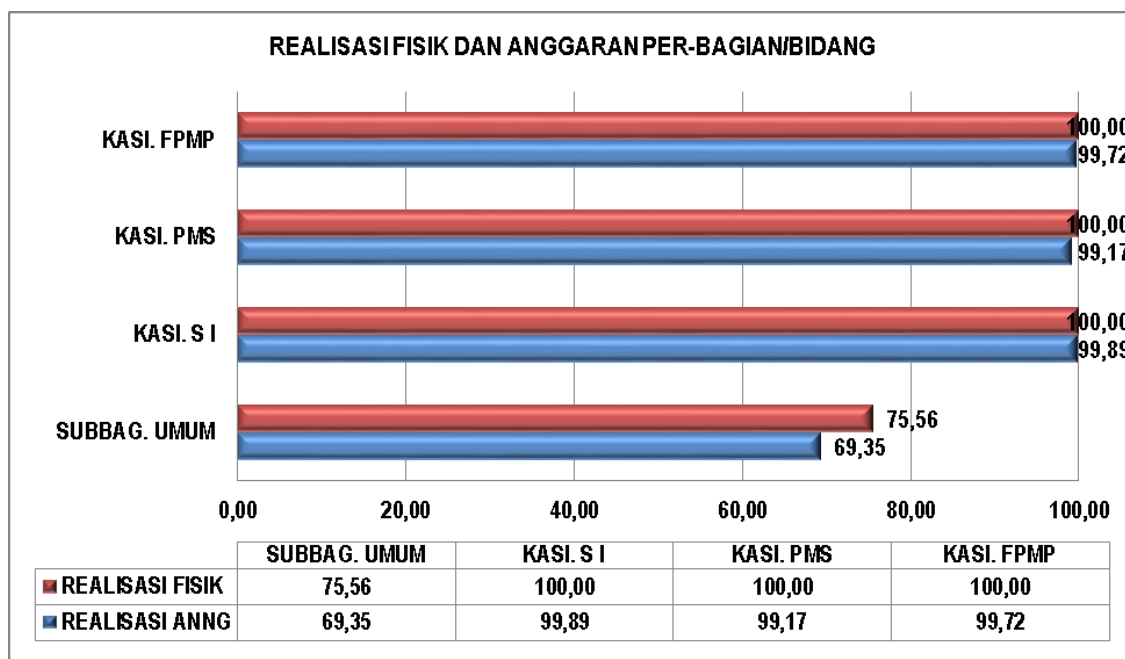
NO.	URAIAN		BELANJA BARANG		(%)	BELANJA MODAL		(%)
	KODE	NAMA SATKER	ALOKASI	REALISASI		ALOKASI	REALISASI	
I	419546	LPMP PROVINSI NTT	38.353.759.000	38.173.647.951	99,53	8.518.600.000	8.400.528.209	98,61
			38.353.759.000	38.173.647.951	99,53	8.518.600.000	8.400.528.209	98,61
	1	Subbag. Umum	8.342.382.000	8.276.826.696	99,21	8.518.600.000	8.400.528.209	98,61
	2	Kasi. Sistem Informasi	9.273.966.000	9.263.398.037	99,89	0	0	#DIV/0!
	3	Kasi. Pemetaan dan Supervisi	8.283.506.000	8.214.557.128	99,17	0	0	#DIV/0!
	4	Kasi. Fasilitas PMP	12.453.905.000	12.418.866.090	99,72	0	0	#DIV/0!
<b>JUMLAH</b>			<b>38.353.759.000</b>	<b>38.173.647.951</b>	<b>99,53</b>	<b>8.518.600.000</b>	<b>8.400.528.209</b>	<b>98,61</b>

Tabel 3.3 Daya serap anggaran LPMP NTT

NO.	URAIAN		JUMLAH		(% REALISASI)		SISA ANGGARAN
	KODE	NAMA SATKER	ALOKASI	REALISASI	KEU	FISIK	
I	419546	LPMP PROVINSI NTT	68.160.520.000	56.352.602.882	82,68	93,89	11.807.917.118
			68.160.520.000	56.352.602.882	82,68	93,89	11.807.917.118
	1	Subbag. Umum	38.149.143.000	26.455.781.627	69,35	75,56	11.693.361.373
	2	Kasi. Sistem Informasi	9.273.966.000	9.263.398.037	99,89	100,00	10.567.963
	3	Kasi. Pemetaan dan Supervisi	8.283.506.000	8.214.557.128	99,17	100,00	68.948.872
	4	Kasi. Fasilitas PMP	12.453.905.000	12.418.866.090	99,72	100,00	35.038.910
	JUMLAH		68.160.520.000	56.352.602.882	82,68	93,89	11.807.917.118

Grafik dan tabel di atas menyajikan distribusi anggaran perbelanja baik dari besaran alokasi dan realisasi anggaran beserta presentase keuangan dan fisik kegiatan untuk masing-masing seksi/subbag yang dilaksanakan LPMP NTT

Grafik 3.2. Grafik Realisasi Fisik dan Anggaran –Bagian/Bidang



### REKAPITULASI PER-BAGIAN/BIDANG

NO	BAGIAN/BIDANG	ALOKASI	REALISASI		
			31 Des 2018	% KEU	% FISIK
1	SUBBAG. UMUM	38.149.143.000	26.455.781.627	69,35	75,56
2	KASI. SI	9.273.966.000	9.263.398.037	99,89	100,00
3	KASI. PMS	8.283.506.000	8.214.557.128	99,17	100,00
4	KASI. FPMP	12.453.905.000	12.418.866.090	99,72	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>68.160.520.000</b>	<b>56.352.602.882</b>	<b>82,68</b>	<b>93,89</b>

Anggaran dialokasikan untuk membiayai masing – masing kegiatan setelah dipetakan dari total pagu anggaran LPMP terdiri atas :

1. Output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Internal dan Layanan perkantoran (5630.950, 5630.951 dan 5630.994) dengan penanggungjawaban di Subbag Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 38.149.143.000,- dan terserap 69,35%.
2. Output sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 (5630.006) penanggunjawab Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) dengan dengan komponen kegiatan mendapat alokasi anggaran sebesar dengan biaya Rp. 12, 453.905.000,- dan terserap 99,72%
3. Output satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (5630.003) penanggunjawab Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.283.506.000,- dan terserap 99,17%
4. Output satuan pendidikan yang terpetakan Mutu Pendidikan (5630.001) Oleh Seksi Sistem Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.263.398.087.000,-

persentase daya serap keuangan LPMP Nusa Tenggara Timur tahun 2018 adalah sebesar 82,68% dan realisasi fisik sebesar 93,89%

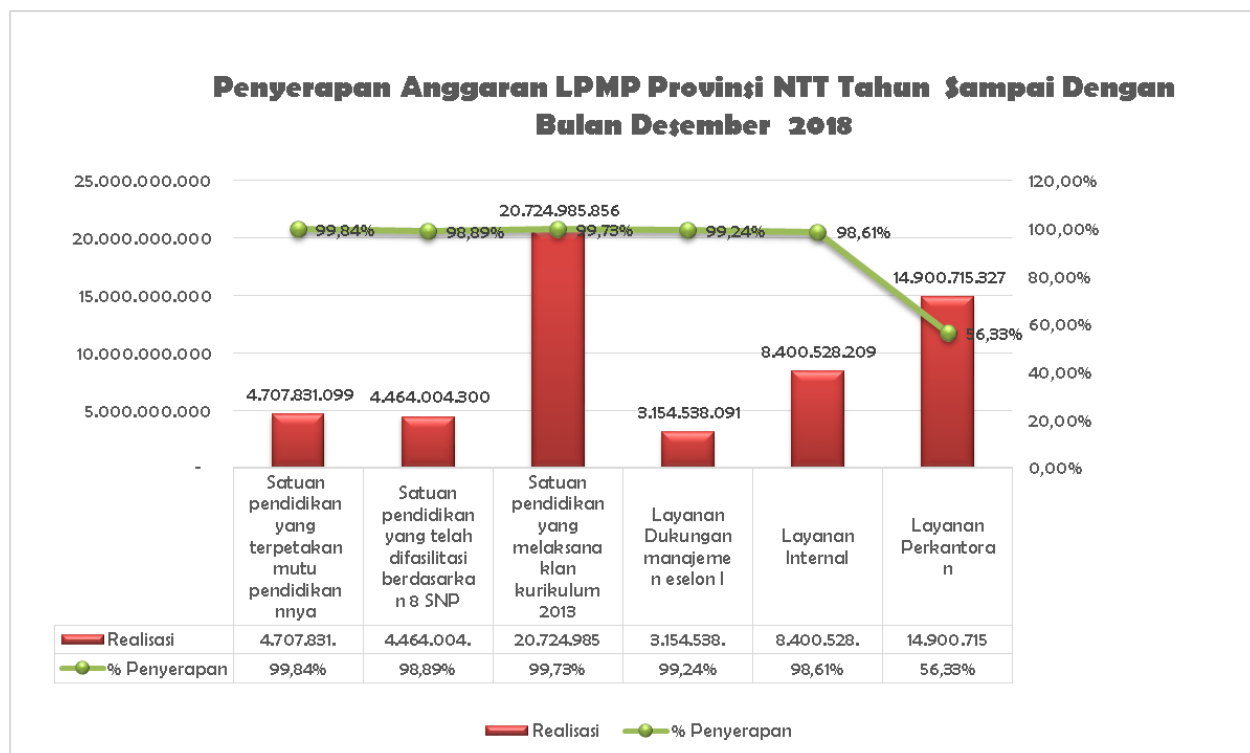


Tabel 3.5 Tabel rincian realisasi anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Peningkatan Layanan</b> <b>Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN YANG TERPETAKAN MUTU PENDIDIKANNYA</b>			
	<b>SEKOLAH YANG TERVERIFIKASI DATA MUTUNYA</b>			
	Jumlah peserta Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan	251.482.000	250.515.000	99,62%
	Jumlah Operator yang mengikuti Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data	232.346.000	231.014.105	99,43%
	Jumlah pengawas yang mengikuti Bimbingan Teknis	1.261.485.000	1.261.044.200	99,97%
	Persentase Data PMP	452.990.000	452.400.000	99,87%
	Jumlah Sekolah yang diverifikasi dan divalidasi	1.226.653.000	1.225.128.700	99,88%
	<b>Jumlah Sekolah yang dipetakan Mutu Pendidikan</b>			
	Peta Mutu	22.400.000	22.350.300	99,78%
	Analisis Data Mutu	289.039.000	287.506.100	99,47%
	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu	351.670.000	351.486.400	99,95%
	Diseminasi Pemetaan Mutu	627.416.000	626.386.294	99,84%
	<b>SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DIFASILITASI BERDASARKAN 8 SNP</b>			
	<b>SEKOLAH MODEL YANG DIFASILITASI</b>			
	Bimbingan Teknis SPMI	807.228.000	805.440.800	99,78%
	Pendampingan Sekolah Model	1.772.162.000	1.769.541.500	99,85%
	Monitoring dan Evaluasi	1.241.791.000	1.238.253.500	99,72%
	<b>Sekolah yang Difasilitasi Melalui Kemitraan</b>			
	Monitoring dan Evaluasi	190.150.000	149.148.500	78,44%
	Diseminasi Hasil	502.900.000	501.620.000	99,75%
	<b>SEKOLAH MODEL YANG TELAH DIKEMBANGKAN MUTU PENDIDIKANNYA</b>			
	<b>SD YANG MELAKUKAN KURIKULUM 2013</b>			
	Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013	631.709.000	627.160.000	99,28%
	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	2.156.658.000	2.147.704.000	99,58%
	Asistensi dan Bantuan Pemerintah	2.933.960.000	2.931.822.500	99,93%
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah	333.040.000	332.572.000	99,86%
	Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh Jenjang Pendidikan	3.021.308.000	3.005.871.590	99,49%
	<b>SMP YANG MELAKUKAN KURIKULUM 2013</b>			
	Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum 2013	1.077.170.000	1.076.300.000	99,92%
	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	1.240.600.000	1.239.114.750	99,88%
	Asistensi dan Bantuan Pemerintah	1.848.880.000	1.848.460.000	99,98%
	Monitoring dan Evaluasi	391.835.000	391.692.188	99,96%
	<b>SMA YANG MELAKUKAN KURIKULUM 2013</b>			
	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum 2013	1.183.060.000	1.180.265.750	99,76%
	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	837.050.000	837.045.250	100,00%
	Asistensi dan Bantuan Pemerintah	1.241.720.000	1.241.200.000	99,96%
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah	115.400.000	115.225.000	99,85%
	<b>SMK YANG MELAKUKAN KURIKULUM 2013</b>			
	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum	839.120.000	833.400.000	99,32%
	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	956.310.000	949.928.228	99,33%
	Asistensi dan Bantuan Pemerintah	1.795.445.000	1.789.600.000	99,67%
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah	178.400.000	177.624.600	99,57%
	<b>LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
	Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran	690.695.000	685.319.000	99,22%
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	829.905.000	825.481.281	99,47%
	Pengelolaan Data dan Informasi	358.180.000	356.836.060	99,62%
	Pengelolaan Ketatausahaan	272.790.000	263.787.200	96,70%
	Pengelolaan Keuangan	93.220.000	91.371.450	98,02%
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	933.793.000	931.743.100	99,78%

Berdasarkan data kinerja keuangan di atas dapat dijelaskan bahwa dari 5 indikator kinerja yang ada realisasinya telah mencapai target.

Berikut grafik daya serap anggaran tahun 2018 per output kegiatan dalam DIPA LPMP NTT



Komponen	Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013	Layanan Dukungan manajemen eselon I	Layanan Internal	Layanan Perkantoran
Pagu DIPA	4.715.481.000	4.514.231.000	20.781.665.000	3.178.583.000	8.518.600.000	26.451.960.000
Realisasi	4.707.831.099	4.464.004.300	20.724.985.856	3.154.538.091	8.400.528.209	14.900.715.327
% Penyerapan	99,84%	98,89%	99,73%	99,24%	98,61%	56,33%



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Nusa Tenggara Timur tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Nusa Tenggara Timur kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPMP Nusa Tenggara Timur telah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Nusa Tenggara Timur berhasil merealisasikan semua output dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis LPMP Nusa Tenggara Timur.

Adapun capaian kinerja LPMP Nusa Tenggara Timur memfokuskan pada rencana pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan hasil capaian kinerja yang diukur dengan 2 cara, yakni:

1. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan renstra LPMP Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2019, dan
2. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan output dalam DIPA LPMP Nusa Tenggara Timur.

Pagu awal LPMP Nusa Tenggara Timur dalam DIPA tahun 2018 sebesar Rp. 69.604.310.000,- (enam puluh sembilan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dilakukan revisi tingkat DJA untuk pemindahan Belanja Gaji dari LPMP NTT ke LPMP Kalimantan Utara sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga pagu anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 68.604.310.000,- (enam puluh delapan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),- Dari total anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 56.352.602.882,- (lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh dua sen rupiah) dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 11.807.917.118,- (sebelas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas sen rupiah). Pagu anggaran tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Sehubungan tentang capaian kinerja tahun 2018, berikut ini adalah beberapa catatan penting yang dapat menjadi informasi bagi pelaksanaan program di tahun berikutnya dan tindak lanjut evaluasi kinerja, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi/sinkronisasi program dari Ditjen Dikdasmen kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan program LPMP sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan jadwal yang sudah direncanakan untuk mencapai sasaran strategis dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Terus berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP;





Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2018 dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan program dan perbaikan dalam pelaksanaan program di tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018 merupakan landasan yang kuat bagi LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan program- program pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar program- program pada masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting lainnya LPMP Nusa Tenggara Timur harus menetapkan langkah strategis, seperti: berkesinambungan, perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.